



RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA RUU KEPARIWISATAAN
KOMISI X DPR RI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

- Tahun Sidang** : 2022 - 2023
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Waktu : 11.25 WIB s.d. 15.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.
Ketua Rapat : Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M./PDIP/Ketua Panja RUU Pariwisata
: Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Acara : Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya dan Wisata Alam.
Hadir : **PIMPINAN** :
1. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M.
2. H.Syaiful Huda
3. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Rano Karno, S.IP.
2. Andreas Hugo Pareira
3. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si.

F-P.GOLKAR :

1. H. Muhammad Nur Purnamasidi
2. Robert Jopyy Kardinal,SAB.

F-P.GERINDRA :

1. Ir. H. Nuroji

F-P.NASDEM :

1. Eva Stevany Rataba

F-PKB :

1. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

F-P.DEMOKRAT :

1. Ir. Bramantyo Suwondo, M.M.

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. Walikota Manado (Andrei Angouw) Beserta Jajaran;
2. Walikot Palembang (Suliman Amin) bebserta jajaran;
3. Bupati Tanah Datar (Eka Putra) beserta jajaran;
4. Wakil Bupati Sragen (Suroto) beserta jajaran;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rindaldi) beserta jajaran;
6. Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
7. Pemerintah Kabupaten Maros;
8. Wakil Walikota Samarinda (Rusmandi) Beserta Jajaran;



JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-PDI PERJUANGAN (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):

Selamat siang dan,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati ada Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw,

Terima kasih atas hadirnya, tadi pagi-pagi sudah mengabsen saya.
Kemudian,

Bapak Walikota Palembang, Bapak H. Harnoyo, S.Sos. beserta jajaran,
Bupati Tanah Datar, Batusangkar, Bapak Eka Putra beserta jajarannya,
Wakil Walikota Samarinda, Bapak Dr. G. Rusmadi Wongso,
Wakil Bupati Sragen, Pak Suroto,

Pak Suroto ini anu Pak Andi sudah ketemu, PKB Pak.

Kemudian Sekda Kabupaten Mentawai, Bapak Rinaldi,
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto,
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Pak Fediansyah,
Pimpinan dan para Anggota RUU Kepariwisata Komisi X yang saya hormati,

Hari ini hadir bersama kita semua dari yang paling depan ini pasti Bapak-Ibu sudah tidak asing lagi Mas Rano Karno dari PDI Perjuangan, kemudian Pak dari Partai Golkar Muhammad Nur Purnamasidi, kemudian dari ujung sana PDI perjuangan Ibu Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si., sebelahnyanya adalah Ibu Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.Psi dari PKS, terus Kemudian Bapak Ir. H. Nuroji dari Gerindra, kemudian Mbak Eva Stevany dari Nasdem.

Teman-teman yang lainnya dari Komisi X akan segera merapat, tadi ada Ibu Hetifah sekarang sedang zoom *meeting* di ruangan yang lainnya.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam RDP Panja RUU Kepariwisata Komisi X bersama para kepala daerah dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat tadi di dari hadir oleh 7 Fraksi dari 9 Fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib Dewan telah terpenuhi. Dengan memijat, mengucap, "*Bismillahirrahmanirrahim*" kami buka RDP Panja RUU Pariwisata Komisi X hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.



(RAPAT : TERBUKA)

(KETUK PALU 1 KALI)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.25 WIB)

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Agenda Panja hari ini adalah pengelolaan wisata daerah aliran sungai, wisata bahari, wisata budaya dan wisata alam, apakah disetujui?

Terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu,

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun dalam kurun waktu 13 tahun Undang-Undang Kepariwisataan dianggap belum optimal dan mencapai tujuannya, begitupun dalam pengimplementasiannya belum berjalan secara efektif.

Sejumlah permasalahan dalam implementasi Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Terdapat ketentuan batasan pengertian atau definisi yang multi tafsir.
2. Kelembagaan yang mengatur mengenai pariwisata belum dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
3. Sumber daya manusia kepariwisataan yang belum diatur secara optimal.
4. Terdapat jenis-jenis wisata yang berkembang saat ini yang belum ada di dalam undang-undang.
5. Seiring berkembangnya teknologi dan dampak dari pandemi Covid-19, perkembangan digitalisasi pariwisata juga tidak diatur dalam undang-undang kita.
6. Pendanaan tentang kepariwisataan, kemudian,
7. Ketentuan mengenai kawasan pariwisata dan ketentuan mengenai sanksi pidana.
8. Pengaturan mengenai pariwisata berkelanjutan.



9. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat substansi ketentuan mengenai kepariwisataan yang perlu diadopsi dan disesuaikan.

Komisi X memandang perlu untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata melalui perubahan arah dan jangkauan pengaturan yang lebih kontekstual, menyeluruh dan komprehensif, sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi.

Komisi X telah membentuk Panitia Kerja RUU Kepanitiaan, Kepariwisataan, dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang tersebut. Kegiatan Panja RUU Kepariwisataan pada masa sidang ini berfokus untuk mendengarkan masukan, serta menyerap aspirasi pemangku pariwisata termasuk pemerintah daerah melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat.

Pada masa sidang sebelumnya, Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenparekraf, para pakar, ahli, organisasi, lembaga kepariwisataan, untuk melakukan pendalaman dan mendengarkan masukan atas beberapa substansi RUU Kepariwisataan dan setelah melakukan pendalaman akan disampaikan ke Baleg untuk dilakukan harmonisasi.

Panja RUU Kepariwisataan Komisi X memandang perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan melakukan komunikasi intens untuk menggali dan mendengar masukan dari pemda, terkait pengelolaan wisata di daerah aliran sungai, wisata bahari, wisata budaya dan wisata alam yang substansi pengaturannya belum ada di dalam undang-undang kita.

Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya yang menarik untuk menjadi wisata unggulan, tentunya pengaturan jenis pariwisata menjadi substansi penting sehingga memberikan dampak ekonomi dan merupakan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Panja telah menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan agenda RDP pada hari ini dengan fokus perhatian pada tantangan dan permasalahan penyelesaian pariwisata di daerah, kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis wisata tirta, wisata bahari, wisata budaya dan wisata alam di daerah.

Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilakan nanti kita berikan urutannya para kepala daerah ataupun perwakilan dari kepala daerah untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda RDP hari ini. Namun sebelumnya kita perlu kesepakatan waktu, kira-kira teman-teman Komisi X akan sampai pukul berapa, pukul 14, pukul 15 kita ada RDP dengan Kemendikbud Raker ya nanti ya. Pukul 14 oke, *matur nuwun*.

Atas permintaan Pak Walikota Manado karena akan mengejar sesuatu yang penting, mengejar pesawat, pesawat telepon atau pesawat. Dipersilakan Pak Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw untuk menyampaikan paparannya. Iya hidup tapi kurang. Sepertinya mic-nya ikutan kena pandemi Covid.

WALIKOTA MANADO (ANDREI ANGOUW):

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Agustin dan Ibu, Bapak Anggota Komisi X yang terhormat
Para undangan sekalian,

Terima kasih.

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih atas kehormatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat-pendapat kami mengenai permasalahan ini rencana perubahan tentang Undang-Undang Kepariwisata.

Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di Tor. Jadi pertama pertanyaan yang nomor 1, 2, kondisi kepariwisataan dan dampak dan tantangannya itu menurut kami pertama-tama kita fokuskan tujuannya. Kita *begin with the end is mine*, jadi hasilnya, hasilnya kan kita mau pariwisata yang jumlah wisatawan yang tinggi dengan *revenue* yang tinggi. Karena kalau jumlah wisatawannya banyak, lalu dia tidak *spent* untuk kita juga hampir tidak dapat apa-apa, kita berharap kan *revenue* dari wisatawan itu yang ada.

Nah untuk itu tentu yang paling kita harus perhatikan adalah konektivitas. Jadi, dan ini sangat lintas sektoral. Kita sudah bikin bagus-bagus, tidak ada jalur yang datang ya *enggak* ada guna. Kaya sekarang ini mungkin ibarat jalan tol dibikin di mana-mana supaya daerah berkembang. Jadi karena di daerah situ ada potensi yang bagus pun kalau tidak ada jalan yang sampai di situ orang juga tidak akan datang ke situ. *Nah* sama aja, kita sudah bangun fasilitas mungkin destinasi yang bagus tapi kalau konektivitas tidak ada tidak ada juga yang akan datang.

Nah jadi saya berharap konektivitas ini di kita seriusi, itu ada dengan Kemenhub, termasuk juga mungkin Kementerian BUMN, karena kan tugas BUMN itu membuka, menjadi pionir. *Nah* kita berharap tentu kayak Garuda menjadi pionir dalam hal-hal seperti ini. Setelah mereka datang tentu banyak instansi terkait Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina, dan sebagainya. Jadi usul kami permasalahannya adalah konektivitas, karena nanti industrinya akan berkembang kalau konektivitasnya ada.

Contoh di Sulawesi Utara bukan di Kota Manado, di Minahasa Utara saat ini ada pembangunan hotel investasinya sekitar 1 triliun, hotelnya waktu itu dikunjungi oleh Bapak Presiden waktu kunjungan bulan Januari, tetapi jalan menuju ke hotel tersebut jalannya kecil, dari Manado kira-kira 1 jam. *Nah* jadi



ini butuh sinkron dengan Kementerian PUPR, karena ini investornya udah ada, tinggal jalannya dibikin. Kalau tempat lain kan kita bikin jalannya dulu baru panggil investornya. *Nah* jadi terus sinkronim sinkronisasi.

Lalu ada pertanyaan alokasi APBN dan APBD. Kalau di daerah di Kota Manado sudah lumayanlah, bulan Januari barusan Bapak Presiden meresmikan destinasi wisata di Kota Manado Malalayang *beach world* dan di Malalayang Bunaken itu anggarannya sekitar 100 miliar dan itu langsung dikelola oleh pemerintah Kota Manado, kita langsung kelola. Karena kalau tidak dikelola dia jadi kumuh ya mubazir juga, dan itu Pak Presiden waktu peresmian langsung menginstruksikan dilanjutkan extensionnya. *Nah* itu juga kami langsung persiapkan lokasi extensionnya, rencana mungkin pertengahan tahun ini sudah mulai pekerjaan extensionnya.

Ada juga *homestay-homestay* yang udah dibuat oleh Kementerian dan dari dana DAK juga untuk membuat fasilitas wisata di Tahura, Taman Hutan Raya yang ada di Kota Manado. Termasuk dari Kementerian Perdagangan juga ada DAK bikin pasar tematik, pasar tematik khusus pariwisata. *Nah* ini menjadi tantangan juga untuk kami dan Manado untuk mengoperasikan, karena kami berharap turis yang datang ini sudah bisa seperti sebelum pandemi. Kalau masih belum, ini tantangan kami juga untuk mengelola pasar tematik ini.

Dari APBD sendiri ya infrastruktur yang kita bangun itu pasti untuk tujuannya juga untuk meningkatkan pariwisata, menata kota, pedestrian kita bikin, pasar tradisional kita bikin lebih-lebih bagus, kan semuanya juga tujuan untuk wisatawan termasuk menjaga kebersihan tujuannya juga untuk wisatawan. Jadi dari alokasi sebenarnya udah oke, kembali kami sampaikan bahwa hal yang sangat penting adalah konektivitas untuk menandakan turis tersebut.

Saya kasih contoh, dalam sudah satu bulan ini ada penerbangan langsung Manado ke Tokyo dengan Garuda, seminggu sekali. Akan tetapi, itu saat ini *booking*-annya cuman bisa sampai bulan Mei, waktu mau di-*booking* bulan Juni udah *enggak* ada. Sudah cek ke Garuda, jadi izin dari Kemenhub cuman keluar sampai bulan Mei. *Nah*, kita berharap menjadi daerah tujuan wisata, wisatawan itu *planning-planning* kepergiannya itu pasti 6 bulan sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya dan mereka kalau ke Manado mau ke Manado bulan Juli pada saat ini mereka belum bisa *booking* yang pesawat *direct* tersebut. Kalau dia mungkin harus muter-muter mungkin tidak jadi dia ke Manado. *Nah* jadi ini konektivitas sangat-sangatlah penting, karena *nggak* akan guna kita bikin semuanya kalau tidak ada konektivitas.

Lalu ada pertanyaan mengenai disharmonisasi aturan. Sejauh ini sih kami belum melihat ada yang sangat mencolok, tapi banyak yang mengeluh mengenai OSS, *online single submission* itu. Jadi banyak mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau bagaimana kami juga kurang mengerti karena itu kan langsung dari-dari sini dari Kementerian Perekonomian kali itu. *Nah* jadi itu mendapat masukan dari para pelaku usaha.



Contoh, waktu membuka ada jalur Jepang ini, kami tertarik dengan potensi pasar untuk para senior *citizen*, jadi para orang-orang tua yang di Jepang di rumah jompo kita bisa buka pasar untuk 3 bulan waktu musim dingin sekali di sana, bisa datang di Manado kita bikin rumah jompo juga seperti itu. *Nah* itu setelah kami pelajari lebih lanjut kayak di Jepang mereka mau kan ada dokternya. Lalu di Jepang orang Jepang cenderung mau dokternya juga orang Jepang, itu kita *nggak* bisa, karena ada aturan-aturan kita dari ini dan sebagainya yang tidak memberikan peluang untuk itu. Jadi mungkin ya *market* itu tidak akan bisa kita rebut kalau tidak ada pembenahan terhadap aturan-aturan tersebut.

Lalu sejauh mana pembangunan kepariwisataan daerah. Ya *so far so good*, sampai saat ini oke, bisa di ada pembangunan, tapi itu tadi kita perlu orangnya dulu, nanti waktu orangnya datang semuanya pasti akan mengikuti, swasta pasti akan masuk begitu pasarnya ada.

Upaya-upaya dari Dinas Pariwisata, organisasi pariwisata per saat ini Manado ini targetnya *divers*. Jadi *diving-diving* di Manado mereka keliling dunia. Setiap tahun di dunia ini ada beberapa pameran untuk *diving* dan itu semua *resort* keliling dunia untuk ikut pameran, termasuk dari dinas pariwisata juga, termasuk dari Pemkot Manado, karena sekarang kan semua di medsos jadi kita juga anggarkan di Facebook untuk mempromosikan pariwisata. Kita kadang-kadang kalau lihat medsos buka Facebook ada kayak Petra Jordan, promosi destinasi, Manado juga kita bikin hal seperti itu.

Nah lanjut mengenai tanggapan atas penyusunan RUU perubahan ini, dari kami ya kami berharap walaupun ada nanti ini dia harus lebih menggigit. Jadi niatnya agar supaya lebih menggigit dengan tujuannya bagaimana kita meningkatkan. Jadi targetnya kan kita pasti meningkatkan sebenarnya meningkatkan *revenue*, tapi untuk menaikkan *revenue* ya ada kuantitas jumlah turis. *Nah* saya berharap yang penting tujuan untuk itu jelas dan kita bikin undang-undang ini.

Saya berharap *cake-cake* pariwisata termasuk yang di Minahasa Utara, Minahasa Utara itu persis sebelahnya Manado. *Cake* pariwisata ya diperkuat, karena kalau kami lihat *cake* pariwisata Likusa ya boleh dibilang belum jalan, justru yang investasi yang masuk di luar *cake* pariwisata itu yang saya bilang sekitar 1 triliun investasi bikin hotelnya. Saya rasa itu perkuat aja yang yang sudah ada, program-program pemerintah yang sudah ada termasuk *cake* pariwisata itu di fokus di situ.

Ya memang kita harus memilih, mungkin *nggak* bisa untuk semua tapi kita harus memilih berdasarkan pasaran kita akan target. Kami di Kota Manado, Sulawesi Utara, jarak kira-kira 4 ribu kilo ke Tokyo, 4 ribu kilo juga ke Sydney Melbourne, sekitar 4 ribu kilo ke Beijing, 2.500 kilo ke Hongkong dan sekitarnya, Guangzhou dan sekitarnya. Memang *market* China itu kita berharap karena *nggak* jauh dari kita.



Sebelum pandemi 200 juta turis China ke luar negeri, *nah* kita secuil aja dari situ udah sangat bagus untuk untuk kita. Jadi target *market* harus jelas. *Nah* lalu, jadi itu *urgency* yang mendasar untuk perubahan. Saya berharap kita fokus beberapa lokasi prioritas dan fokus di situ.

Lalu undang-undang apa saja yang seperti saya sampaikan tadi tentu ini sangat banyak, termasuk Undang-Undang Kesehatan kalau mau kasih fasilitas ya Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Ciptaker, Cipta Kerja yang baru juga semua ada di situ.

Lalu petugas pemerintah daerah membangun dan mengembangkan kawasan destinasi wisata di penyangga, di sekitar destinasi wisata. Prinsipnya *nggak* masalah, tapi kan kita sebenarnya berusaha mendorong swasta. Pemerintah itu sebagai pemicu, pada saat swasta belum bergerak pemerintah bergerak dulu, tapi itu tadi wisatawan saya rasa untuk wisatawan yang datang sekarang kita sudah cukup. *Nah* nanti waktu ke tambahan wisatawan datang itu pasti swasta akan masuk.

Kalau di Manado dan sekitarnya termasuk Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa, swasta sudah masuk. Jadi destinasi-destinasi yang ada sudah-sudah cukup, *nah* nanti dia pasti akan akan berkembang. Saat ini konektivitas Manado ke luar negeri selain yang Jepang satu minggu satu kali, ke Singapura lewat Scoot itu satu minggu tiga kali per April per minggu depan udah satu minggu empat kali. *Nah* jadi ini tinggal-tinggal kita tingkatkan terus.

Lalu mengenai pengaturan dalam RUU yang baru ini saya *nggak* tau ya tapi apa yang mau diatur. Sebenarnya kita kalau bisa jangan terlalu banyak mengatur, kita mengatur hal-hal yang memang harus diatur, agar supaya kita jangan menambah birokrasi, jangan sampai kita membuat investasi jadi lebih ribet. Saya rasa aturan-aturan yang udah ada yang mungkin bisa disempurnakanlah, tapi kalau mau tambah-tambah item, ya mungkin dipikirkan yang penting ya silakanlah tentunya ya, tapi kalau yang penting mendingan kita jangan mengatur agar supaya tidak.

Karena kadang-kadang aturan itu begitu diinterpretasi sampai di bawah sudah ke mana-mana, udah lari ke mana-mana dan mungkin ada oknum-oknum yang akan pakai itu untuk kepentingannya pribadi. Jadi saya mau mengingatkan nanti kalau *nggak* perlu diatur *nggak* usah diatur.

Yang terutama kembali terakhir, yang terutama saya berharap orang ini, semangat ini kita lakukan semua, bagaimana untuk meningkatkan *revenue* bangsa Indonesia ini, negara kita dari pariwisata. Tentu dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tentu juga dengan membuka konektivitas-konektivitas yang ada.

Demikian dari saya Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian Anggota Komisi X yang terhormat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Terima kasih.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Walikota Manado.

Jadi rupanya Manado itu sudah punya jalur penerbangan Manado-Tokyo, cuma izinnya baru sampai bulan Juni ya, oh bulan Mei. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu *concern* kita untuk supaya *support* pemerintah itu tidak tanggung-tanggung, mungkin perhubungan perlu melihat keseriusan penumpang di antara Manado dan Tokyo, Tokyo-Manado ini, kalau sudah banyak nanti ditambah lagi, tapi itu membuat situasi *uncertain* ya sehingga menghambat proses-proses pariwisata yang mungkin harus direncanakan beberapa bulan sebelumnya ya.

Terima kasih Andre Angouw masukannya, apakah mau mendahului atau masih mau mendengarkan teman-teman? Ya baiklah, kemudian kita kembali pada urutan yang pertama.

Mohon maaf ya Pak Walikota Palembang, *monggo* disilakan Bapak H. Harnojoyo, S.Sos., namanya kok Jawa banget, yang mana itu, oh yang ini, Walikota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG (SULAIMAN AMIN):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan rapat,
Wakil Ketua Komisi X, Ibu Agustin beserta,
Seluruh Anggota Komisi X,
Yang kami hormati Bapak-Bapak Walikota atau Kepala Daerah,
Peserta rapat yang kami hormati,

Izin Pimpinan, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Walikota Palembang, Bapak H. Harnojoyo, sebetulnya beliau akan langsung hadir, sebetulnya sudah di Jakarta ini tapi semalam karena kondisi kurang sehat jadi beliau mewakilkan kepada kami, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Saya hadir juga bersama rekan-rekan saya, ini ada kepala dinas PUPR, Kominfo, Kabag Hukum, dan lain-lain.

Pada kesempatan ini kami juga tentunya mengucapkan terima kasih sudah diundang di dalam rangka RDP Undang-Undang Kepariwisata, tentunya banyak hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan di dalam revisi ini.



Sehubungan dengan kondisi kepariwisataan di Palembang, perlu kami sampaikan juga kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X, Palembang ini sebetulnya kota wisata yang memang potensinya adalah sungai. *Nah* dari pariwisata inilah Palembang menghasilkan, jadi sektor pariwisata ini adalah sektor unggulan karena 25-30% itu pendapatan asli daerah itu masuknya di pariwisata.

Nah pariwisata ini pada saat sebelum pandemi itu banyak kunjungan-kunjungan di Kota Palembang, tetapi pasca pandemi seperti yang disampaikan oleh Bapak Walikota Manado tadi, konektivitas ini yang penting. *Nah* menuju ke Palembang saat ini setelah pandemi, sebelum pandemi, Palembang bandara udaranya internasional, setelah pandemi sekarang tidak lagi internasional. Dulu *flight* kita jumlahnya ada 70, sekarang turun menjadi 30.

Kalau dulu ada *direct* langsung ke China, *direct* langsung ke Singapura, ke Malaysia, ke kota-kota besar yang ada di Kota Palembang, tetapi sekarang tinggal 26. Jadi semuanya kalau mau menuju ke Palembang, kita harus *connecting* dulu melalui Jakarta. *Nah* jadi inilah salah satu yang mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan wisata yang ada di Kota Palembang.

Jadi kita berharap mungkin ke depan, ya melalui pemerintah pusat mungkin melalui RDP Undang-Undang ini akan diatur tempat-tempat wisata bagaimana lebih dipermudah dari sisi aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini sangat penting, terutama dalam pengembangan kepariwisataan yang ada di Kota Palembang.

Yang kedua, sehubungan dengan kondisi kepariwisataan yang ada di Kota Palembang ini. Memang saat ini Palembang mempunyai destinasi ada 77, tapi kita fokus di 15 destinasi besar, termasuk juga destinasi wisata sungai. *Nah* ini sepertinya kita sangat memerlukan dukungan *support* dari pendanaan, kalau hanya mengandalkan APBD Kota Palembang sangat terbatas. *Nah* untuk itulah mungkin melalui regulasinya bisa diperbanyak untuk memberikan *support-support* pembangunan aksesibilitas menuju kawasan-kawasan yang ada wisata yang ada di Kota Palembang.

Nah selanjutnya apakah dampak atau keuntungan kekurangan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan pariwisata. Tentunya ini sangat besar dampak dalam pengelolaan pariwisata, karena ini tidak bisa masalah ini diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Tentu perlu dukungan dan *support* dari pemerintah pusat.

Kami berharap melalui revisi undang-undang ini akan lebih diperbanyak peningkatan SDM kepariwisataan yang ada di daerah, yang dilakukan oleh pihak kementerian atau pemerintah pusat. Karena apabila ini hanya mengandalkan kemampuan daerah tentunya ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Selanjutnya, apakah terdapat disharmoni peraturan terkait penyelenggaraan pariwisata menghambat penyelenggaraan pariwisata di daerah? Ini ada satu hal terhadap penerbitan TDUP, Tanda Usaha Ke

perusahaan. Selama ini sudah dilaksanakan melalui OSS, *online single submission* tetapi melalui sistem ini ada suatu kelemahan.

Kita di daerah pemerintah daerah, tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi, sehingga ketika terjadi permasalahan baru kita diajak. Contoh misalnya suatu tempat hiburan malam, mereka sudah mengurus izin melalui OSS, tetapi izin keluar pada saat operasional mereka diprotes oleh warga masyarakat, *nah* penyelesaiannya kembali lagi kepada kita.

Nah kita berharap kiranya di dalam penerbitan izin ini harus kita kaji dulu sebelum terbitnya izin ini. Jadi sekarang ini sepertinya keluar anak dulu baru Bapak ini, kalau kita istilahkan. Jadi kita berharap izin ini sebelum keluar kita kaji dulu, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan di lapangan.

Mungkin ini bisa dimasukkan juga di dalam RDP Undang-Undang Kepariwisata ini, karena ini mungkin bukan hanya di Palembang, mungkin di seluruh daerah menjadi permasalahan terhadap TDOP melalui OSS ini. Karena betul-betul menjadi kendala kami di lapangan pada saat ada masalah kami yang selalu dipanggil oleh pihak aparat penegak hukum, karena dianggap kita sudah menyalahi kewenangan di dalam mengeluarkan aturan-aturan ini.

Selanjutnya juga bagaimana upaya dinas pariwisata atau akademisi, pihak swasta media dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata di daerah. Kita tahu bahwa, apalagi di daerah di daerah ini ya pariwisata tidak akan berkembang tanpa promosi maupun publikasi. Jadi ini perlu kegiatan-kegiatan ini dan harus mendapat *support* dan dukungan dari pemerintah pusat.

Contohnya kami di Palembang Ibu Pimpinan, di dalam promosi ini juga kami sudah melakukan segala cara, termasuklah kita sistem menggunakan media digital, yaitu Palembang 360. Jadi melalui aplikasi Palembang 30 kita berharap wisatawan sudah melihat destinasi-destinasi wisata yang kita tawarkan sebelum mereka berkunjung ke Kota Palembang.

Kita berharap tentunya program ini akan mendapat *support* juga dari pemerintah pusat, karena selama ini ini hanya didukung oleh anggaran pemerintah daerah, karena promosi ini sangat penting bagi pengembangan pariwisata yang ada di Kota Palembang.

Nah bagaimana tanggapan pemerintah daerah atas rencana penyusunan undang-undang, Rancangan Undang-Undang Nomor 10/2009. Jadi intinya bahwa, pemerintah Kota Palembang bersama sektor ekonomi kreatif sangat mengharapkan Rancangan Undang-Undang perubahan ini dapat mempercepat upaya pembangunan pariwisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Palembang.

Undang-undang apa saja yang perlu dianalisis, jadi ini sekarang ini sepertinya perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kepariwisata, karena ini sangat kait erat hubungannya di dalam pelaksanaan industri kepariwisataan.



Selanjutnya, tugas pemerintah daerah selain menetapkan, melaksanakan mengevaluasi, mengkoordinasikan kebijakan kepariwisataan, kami juga dari pemerintah Kota Palembang sepakat di dalam menetapkan, melaksanakan dan mengawasi dan kami juga pemerintah Kota Palembang saat ini sedang menyusun Perda RIPPARKOT (Rencana Induk Pembangunan Kota Palembang 2021 sampai dengan 2031). Ini tentunya akan kami mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 9, Nomor 10/2009 ini, di mana setiap pembangunan yang ada di Kota Palembang, ini harus bersinergi dengan RIPPARKOT ini dan kita juga saat ini sedang menyusun Raperda RT/RW merevisi, di mana kita sudah menetapkan kawasan tepian sungai itu sudah menjadi kawasan strategis.

Kalau selama ini kawasan tepian sungai itu tidak bisa dibangun mungkin untuk pengembangan kepariwisataan, dengan adanya Perda reparcode maupun Perda RT/RW ini, mudah-mudahan ya wisata sungai ini bisa kita gali menjadi potensi pengembangan wisata yang ada di Kota Palembang.

Selanjutnya juga, Rancangan Undang-Undang perubahan Nomor 10 2009 akan mengatur Keberadaan Wisata Sungai. Kami berharap pembahasan mengenai hal ini dapat memberikan informasi yang jelas, yang akan kami adopsi, kami masukkan di dalam reparcode maupun rencana tata ruang yang sedang kami susun ini.

Kami kira ini mungkin sementara masukan dari Pemerintah Kota Palembang, sekali lagi kami berharap ya, apa yang kami sampaikan tadi Pimpinan, karena sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di pemerintah Kota Palembang. Karena Kota Palembang ini adalah kota jasa dan perdagangan yang tidak mempunyai sumber daya alam seperti kota-kota yang lainnya.

Mungkin ini, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang terkenal sama Pempek ya Pak?

WALIKOTA MANADO (ANDREI ANGOUW):

Izin Pimpinan saya.

KETUA RAPAT:

Iya *monggo-monggo* Mas Andrei, terima kasih atas hadirnya ya, jauh sekali dari Manado, *monggo-monggo*.



Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Bupati Tanah Datar atau Batusangkar, Bapak Eka Putra, S.E.,M.M., yang-yang benar namanya Tanah Datar apa Batusangkar Pak?

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA) :

Kabupaten Tanah Datar, Ibukotanya Batusangkar.

KETUA RAPAT:

Demikianlah, baiklah.

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi X,
Yang kami hormati seluruh Anggota Komisi X yang rajin bulan puasa hadir di RDP ini, dan
Rekan-rekan kepala daerah, rekan-rekan kepala daerah yang kami banggakan juga rajin jauh-jauh datang ke ibukota demi memperjuangkan pariwisata di daerahnya,

Pertama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi yang menunaikannya dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pimpinan Komisi X yang mengundang kami di acara RDP ini.

Kami singkat aja kami tadi sudah membuat, Pimpinan nanti akan kami serahkan langsung kepada Pimpinan. Sebelumnya kami akan menyampaikan tentang Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar ini berada di Provinsi Sumatera Barat, tujuan wisata utama dengan lebih dari 200 potensi daya tarik wisata; seperti wisata alam, sejarah, budaya, religi, seni tradisional dan atraksi unik seperti pacu jawi. Pacu Jawi ini kalau di Maduranya garapan sapi ya.

Terus juga terdapat 10 daya tarik wisata unggulan yang sudah banyak dikunjungi seperti istana bakso Pagaruyung, panorama air terjun di dunia, Tanjung Mutiara, Panorama Puncak patung, air terjun Lembah Anai, batu Angke-Angke, Panorama Tabek Patah, air panas ini air ange Padang Ganting dan tenun. Tenun pande sike menimbaui, dan juga tenun



limpau. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata dunia yang terkenal dengan keindahan alam dan keunikan budaya lokal dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Alhamdulillah tahun 2022 kemarin lebih kurang satu juta pengunjung yang datang ke Tanah Datar target kami di 2023 ini 2 juta pengunjung datang ke Tanah Datar.

Tentu dalam ini kami ada beberapa kendala dalam pengembangan kepariwisataan yang pertama terkait izin usaha pariwisata. Masih ada aturan yang tumpang tindih, yaitu Permenpar Nomor 10 Tahun 2014 dengan Permenparekrif Nomor 4 Tahun 2021 di mana menurut peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ini tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi. Secara elektronik sektor pariwisata dijelaskan bahwa pendaftaran penelitian dapat dilakukan secara *online*.

Namun pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata Yang Menjadi Dasar Penerbitan Perizinan Sektor Pariwisata. Permenpar Nomor 4 Tahun 2021 ini, tidak mencabut Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 sehingga mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam pemberian izin usaha pariwisata di daerah.

Selanjutnya yang kedua, Kabupaten Tanah Datar memiliki budaya lokal wisata alam wisata tirta seperti sungai, danau, yang tidak tertampung pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Namun merupakan daya tarik wisata potensial yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, di mana infrastruktur dan SDM yang masih terbatas yang memerlukan perencanaan.

Misalnya ada kendala dalam pengembangan pariwisata dilanjut dari tadi. Di Sumatera Barat pada umumnya dan di Kabupaten Tanah Datar khususnya pengembangan kawasan destinasi penyangga dihadapkan pada permasalahan status lahan yang merupakan biasanya tanah ulayat. Ini sedikit ada permasalahan juga bagi investasi yang ingin datang ke bahkan ke Sumatera Barat.

Selanjutnya, kurang kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergikan produk regulasi daerah dengan produk regulasi pemerintah pusat, tapi *alhamdulillah* hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir di sini.

Yang terakhir, tidak sesuai produk regulasi dan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah. Tentu dalam hal ini dikendala ini kami mempunyai ada beberapa upaya yang kami lakukan bagi pemerintah daerah. Ya tentu dalam rangka pengembangan pariwisata pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama penetapan Perda *trip market* Kabupaten Tanah Datar, yang kedua menjadikan pariwisata sebagai program unggulan.



Kami di Tanah Datar mempunyai program unggulan “satu nagari satu *event* atau satu desa satu *event*”, di sana desa namanya nagari, Pimpinan ya. Di mana melalui program ini dapat menggali, melestarikan dan mempromosikan potensi pariwisata lokal, baik alam dan budaya maupun sejarahnya. Yang ketiga, bersinergi dalam kegiatan pengembangan pariwisata di daerah.

Selanjutnya peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan dan pembinaan Pokdarsiwis dan komunitas-komunitas lainnya.

Harapan kami atas RUU Kepariwisata ini, yang pertama sehubungan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, dengan adanya RUU Kepariwisata ini diharapkan kiranya dapat mengakomodir.

Yang pertama, pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata di masyarakat. Pengaturan yang jelas antara konsep penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan dan konsep pembangunan sumber daya manusia pendukung kepariwisataan, serta teknologi informasi yang mensinergikan pengelolaan data pariwisata secara nasional sebagai tempat promosi daerah dan sarana informasi bagi wisatawan.

Selanjutnya yang kedua, pengelolaan destinasi dan pariwisata berupa sanksi pengunjung yang merusak lingkungan. Yang ketiga, digitalisasi serta *positioning* destinasi wisata di dunia maya. Selanjutnya, penguatan budaya dan lingkungan dari pengaruh asing dan atau penggunaan asing. Selanjutnya kemudian investasi bagi daya tarik wisata.

Kami di Tanah Datar telah ditetapkan Perda reparkab Kabupaten Tanah Datar 2023-2025. Pengembangan pembangunan pariwisata pemerintah daerah agar dapat diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu RUU Kepariwisata yang sedang kita bahas saat ini.

Selanjutnya, pengembangan wisata halal di mana provinsi Sumatera Barat merupakan, setau kami satu-satunya yang telah memiliki Perda Wisata Halal, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat, hal ini dapat diakomodir pada RUU Kepariwisata yang dibahas saat ini.

Selanjutnya, Undang-Undang yang perlu dianalisis. Undang-Undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, terutama pasal yang terkait pengaturan mengenai tata ruang dan iklim investasi, serta perizinan.

Di samping itu juga perlu pertimbangkan penyesuaiannya dengan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah agar tidak terjadi benturan atau disharmonisasi antara undang-undang yang akan disusun dengan peraturan dimaksud, karena waktu dokumennya adalah 20 tahun.

2. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007, 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
4. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa, selanjutnya
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya, selanjutnya
6. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Reparnas tahun 2010-2022, selanjutnya
7. Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal, selanjutnya
8. Permen Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Pariwisata, selanjutnya
9. Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta, serta saya ulangi Sektor Pariwisata.
10. Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata.

Itu yang kami sampaikan singkat Pimpinan, nanti akan kami berikan jawaban tertulis dari pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada kami pemerintah daerah kemarin.

Demikian waktu yang diberikan kepada kami, banyak maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,



Sungguh indah sekali ya Tanah Datar, Batusangkar, siapa mau ke sana nanti?

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Ditunggu siap, siap kami fasilitasi. Itu harus bermalam, Pimpinan. Kami juga ada hotel-hotel bintang 4 ada *homestay*-nya.

KETUA RAPAT:

Di Padang ya?

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Dari bandara satu setengah jam sudah tiba di Tanah Datar, turun bandara Padang Minang.

KETUA RAPAT:

Bandara Minang satu setengah jam?

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Satu setengah jam sudah tiba di Tanah Datar, di sana selain indah alamnya juga kulinernya enak dan enak sekali.

KETUA RAPAT:

Berarti abis lebaran ini langsung cus.

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Ditunggu dengan hormat, dengan senang hati kedatangan Komisi X.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bupati.

Dan sudah masuk ya nanti di-*insert* ke beberapa usulan yang ada di RUU kita. Terima kasih sekali lagi.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Wakil Walikota Samarinda eh mohon maaf, mohon maaf Wakil Walikota Samarinda atas permintaan Bu Hetifah, karena beliau mau bergabung sebentar lagi setelah zoom dimohon untuk nanti menunggu Bu Hetifah ya, Pak. Sekarang Wakil Bupati Sragen, ini daerah pemilihan saya ini. Sragentina Pak biar agak keren sedikit.

Monggo silakan Pak.

WAKIL BUPATI SRAGEN (SUROTO):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-Ibu Pimpinan beserta Anggota DPR Komisi X yang saya hormati,
Rekan-rekan dari Pemda yang kami hormati,

Pertama-tama saya memohonkan izin Ibu Bupati Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini tidak bisa di tengah-tengah kita sekalian memberikan kami untuk menyampaikan aspirasi atau sesuatu yang nantinya bisa untuk kegiatan di Kabupaten Sragen.

Dan yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi X, *alhamdulillah* kemarin tahun 2022 sudah dapat Gunung Kemukus, Ibu. *Inshaallah* nanti tahun ini 2023 dapat yaitu Poltekpar *insyaallah* dengan anggaran 2,7 triliun walaupun *multi-years*. Sekali lagi saya terima kasih dan yang berikutnya kita hanya menyampaikan yang poin-poin saja, nanti kita haturkan filenya kepada Pimpinan.

Yang pertama, keberadaan Sragen perlu kita ketahui bersama Bapak-Ibu sekalian. Kota kecil tapi *alhamdulillah* penyangga pangan nasional otomatis kita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat harus ada terobosan-terobosan, yaitu kepariwisataan.

Di sisi lain walaupun sudah kita banyak sekali yang kita peroleh tapi perlu kami sampaikan dengan adanya yaitu Kedung Ombo dan Gunung Kemukus untuk kita histori yang datang itu masih banyak kendala Bapak-Ibu sekalian. Status lahan itu masih kewenangan yaitu DAS, PPWS, *family*, pamali Juana itu perinciannya tidak segampang yang kita harapkan.

Dengan harapan usulan kami yaitu, ada kemudian perizinan. 2 pendampingan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati dengan keberadaan gedung kemukus dan gedung penonggo.

Sementara ini adalah wisata airnya itu masih, ya kita memalukan Bapak-Ibu sekalian, yaitu masih perahu perawisataanya itu pakai perahu nelayan, ya apa adanya. Maka daripada itu sekali lagi mohon hormat lagi, sangat dukungan dari Bapak-Ibu sekalian Komisi I ini bisa bener-bener kita rasakan. Oh iya maaf Komisi X.

Yang berikutnya, yaitu untuk pengelolaan wisata kawasan perkebunan dan Kehutanan. Embrio dari Sragen khususnya Kecamatan Sumberlawang ini adalah ada pacuan kuda tapi perizinannya masih sulit sekali, masalahnya beririsan dengan adanya Perhutani ataupun perkebunan. Maka daripada itu tidak hanya di Sumberlawang, tapi di Bayanan, Kecamatan Sambirejo itu sama seperti di Sumber Lawang itu.

Dan yang untuk berikutnya yaitu untuk poltekpar, poltekpar Gemolong walaupun di Sragen. Untuk eksistensi tidak hanya sebagai pusat akademi, tetapi juga menjadi unsur utama pendukung perkembangan wisata Sragen. Perlu usulan kami yaitu, ada pendampingan *skill* dasar keahlian di bidang pariwisata. Mitra pengembangan wisata Sragen melalui perjanjian kerjasama, di sisi lain supaya ada dukungan embrio wisata desa ini sudah ada 41, jadi nanti kita sampaikan supaya ada perjuangan Bapak dan Ibu sekalian.

Dan yang terakhir, yaitu masalah Sangiran. Perlu kita ketahui bersama yaitu, wisata sejarah fosil tapi pemanfaatan 4 desa yang ada di kawasan Sangiran belum berdampak secara signifikan dengan adanya museum Sangiran ini.

Yang kedua, perizinan atau produsennya sangat sulit seperti perizinan apa saja yang ingin masuk di Sangiran itu sendiri. Ini mohon dengan hormat supaya ada regulasi yang sifatnya bisa mendukung kegiatan-kegiatan di Sangiran.

Yang berikutnya yaitu, pemberdayaan *guide*, *guide* lokal supaya ada dengan aturan-aturan yang jelas. Selama ini adalah kalau ada wisata yang pakai bus itu sudah bawa *guide*-nya sendiri, jadi yang lokal itu tidak bisa berbuat apa-apa.

Yang terakhir yaitu, dengan harapan Sangiran ini ada kompensasi terhadap masyarakat lingkungan. Alasannya apa, alasannya ya untuk izin apa saja kan tidak diperbolehkan, dalam hal ini adalah lagi industri dan sebagainya di sana Ibu tahulah, Ibu Pimpinan, jadi di sana *home* industri entah itu dari mebel ataupun konveksi tapi untuk pengembangannya kan ya sulit sekali.

Saya kira itu nanti laporan yang disampaikan *file*-nya kurang lebihnya mohon maaf.

Akhirul Kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Suroto, memang kendala besar itu ada di Sangiran ya Pak, orang punya tanahnya sendiri mau dipaculi untuk ditanami aja *nggak* boleh ya, sama Sangiran itu. Ini jadi menghambat ya, belum sampai ke pariwisatanya untuk pemanfaatan lahan sendiri aja kesulitannya bukan main. Iya, takut ada ke ini tengkoraknya petrekan *pithecanthropus erectus*. Terima kasih sekali lagi Pak Wakil Bupati Sragen.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Rinaldi, S.Kom., M.M.,



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
(RINDALDI, S.Kom., M.M.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Komisi X DPR RI,
Beserta Bapak-Ibu Anggota DPR RI yang hadir pada RDP kita pada hari ini,
Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Bupati, Walikota atau
yang mewakili beserta,
Jajaran yang hadir pada ruangan ini,

Yang pertama-tama marilah kita membiarkan puji dan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan
dalam keadaan sehat bisa melaksanakan RDP terkait dengan RUU Undang-
Undang Kepariwisata penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019.

Langsung saja Bapak-Ibu, kami dari Kabupaten Mentawai akan sedikit
menceritakan terkait dengan kondisi Kabupaten Pulau Mentawai dari sisi
pariwisata, di mana sama seperti daerah lain sebenarnya kita dari sisi
infrastruktur sangat mengalami kekurangan atau sangat minim sekali, sehingga
tentu ini akan berdampak terhadap pembangunan pariwisata yang ada di
Kabupaten Pulau Mentawai.

Dapat kami informasikan bahwasannya, saat ini transportasi ke daerah
kita itu mengandalkan kapal karena kita merupakan satu daerah yang
kabupaten yang terpisah dari pulau Sumatera. Jadi satu-satunya Sumatera
Barat yang ada di daerah kepulauan dan tentu ini merupakan hal yang sangat
menghalangi sekali untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Pulau
Mentawai.

Ada dua transportasi ke sana yang pertama adalah dengan kapal, yang
kedua dengan pesawat, itupun sekarang masih rintisan atau pesawat perintis
yang diterbangi oleh Susi Air.

Yang kedua, kami juga informasikan kepada Bapak-Ibu Anggota DPR
yang terhormat, di Mentawai memiliki 81 destinasi wisata yang terbagi keempat
jenis wisata seperti yang akan dilaksanakan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 10 yang belum terakomodir.

Yang pertama adalah wisata tirta atau sungai. Yang kedua, wisata
bahari, yang ketiga wisata budaya, yang keempat wisata alam, dan tentu ini
sangat membuat kami sangat senang karena ini akan diatur. Karena memang
secara keseluruhan jenis wisata ini ada semuanya di daerah Kabupaten Pulau
Mentawai.

Dari hal tersebut yang sampai saat ini yang kami andalkan itu adalah
wisata bahari yaitu, adanya 72 *sport surfing* di Kabupaten Pulau Mentawai dan
2 sudah sangat terkenal spot International, yang pertama di desa katiet atau di



sebelah selatan, yang satu lagi *spot* makaronis ini berada di Pagai Utara, di Kepulauan Pagai.

Dari wisata bahari ini, Kabupaten Pulau Mentawai saat ini boleh dikatakan dikunjungi didominasi oleh para wisatawan dari mancanegara, hampir 95% wisatawan kita berasal dari mancanegara karena memang olahraga *surfing* masih merupakan olahraga yang mahal dan juga sulit untuk mencapai ke sana. Karena memang secara infrastruktur ini belum memadai.

Dan juga kami dapat informasikan kepada Bapak-Bapak-Ibu-Ibu Anggota DPR RI yang kami hormati, dari *slide* yang kami lihat bahwasanya penghitungan BPS yang wisatawan nusantara itu adalah orang yang datang dan walaupun ini dia bukan tujuan wisata tapi itu dicatat, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur sampaikan yang wisatawan itu yang didominasi oleh orang-orang yang memang perselancar.

Dan pada saat ini kami juga telah mengembangkan wisata alam dan juga wisata budaya. Jadi wisata budaya yang ada di Kabupaten Mentawai memang merupakan satu budaya yang memang berbeda, ada karakteristik yang ada di sana dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di daratan atau Kabupaten Pulau atau Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kita memiliki keunikan, tetapi ini masih dalam-dalam tahapan baru memulai. Jadi kami sudah memiliki pada saat ini ada empat desa wisata dan mudah-mudahan pada tahun 2023 ini menjadi 11 desa wisata dan dari kesemuanya itu memang kita mengandalkan itu adalah budaya dan alam.

Dan *alhamdulillah* pada tahun ini kita memperoleh atau menempatkan satu desa wisata kita namanya Desa Munti yang masuk ke 75 dominasi yang ada sekarang dan akhir bulan besok akan ada yang dari Kementerian Pariwisata yang akan langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung untuk memberikan penilaian.

Selanjutnya juga dapat kami sampaikan, semua akomodasi yang kita sediakan untuk para *pe-surfing* tersebut itu rata-rata berada di kawasan hutan. Jadi para pengusaha *resort* kita beserta *shortcamp* yang ada, karena memang secara lokasi *spot-spot surfing* itu berada di kawasan hutan dan tentu ini ada kaitannya disharmonisasi dengan aturan-aturan lainnya. Jadi sampai hari ini kita belum bisa memberikan izin, karena dia berada di kawasan hutan. *Nah* ini bertentangan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang pengelolaan kehutanan. Ini salah satu aturan yang tidak artinya disharmonisasinya dengan kondisi di perusahaan Kabupaten Pulau Mentawai.

Yang kedua, dukungan kita terhadap pengembang pariwisata, baik itu dari APBN dari provinsi, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten Pulau Mentawai sendiri itu memang masih sangat rendah, karena memang faktor kemampuan keuangan.

Dari pemerintah pusat melalui APBN baru kami memperoleh dari Kementerian PDT Transmigrasi di tahun 2019 dan 2020, itupun belum cukup merubah secara signifikan. Begitu juga dari provinsi dan kami pun di Kabupaten



Pulau Mentawai secara terus-menerus berupaya bagaimana pariwisata di Mentawai ini bisa kita dorong. Karena secara prioritas di Mentawai itu hanya dua yang bisa kita boleh katakan untuk peningkatan pariwisata kita, yang pertama sektor pertanian, yang kedua pariwisata dan tentu hal yang paling menonjol itu adalah pariwisata. Karena kita memiliki daerah, kita memiliki daerah-daerah yang memang pulau-pulau yang tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan perkebunan besar ataupun hal lainnya di luar pariwisata.

Selanjutnya, kami sampaikan terkait dengan usaha-usaha pemerintah daerah, tentu ini juga tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita di kabupaten/kota lain. Walaupun memang belum disahkan tapi saat ini kami sedang pembahasan yang untuk kabupaten dan selanjutnya kami juga sudah berupaya bagaimana pemerintah bisa memberikan ruang ke kita untuk kawasan ekonomi khusus.

Ini sudah lama berjalan dan sebenarnya secara lahan ini masyarakat kita sudah berkomitmen dengan termasuk kita pemerintah, tetapi sampai hari ini belum, belum bisa ditindaklanjuti. Karena konsep awal kita ingin mengharapkan KEK itu dari APBN, tetapi di pertengahan jalan beralih dia ke swasta. Sementara di sisi lain kita selalu dihadang atau dihadapkan masalah kebencanaan, sehingga para investor ataupun pemodal yang akan datang ke Mentawai betul-betul sangat apa namanya, di saat mereka datang sudah serius tapi tiba-tiba nanti akan bicara lagi Megarust dan segala macam sehingga itu selalu menjadi penghalang akhir.

Dan pada hari ini kami informasikan kepada Bapak-Ibu para Anggota DPR RI Komisi X kami sudah membebaskan lebih dari 2 ribu hektar untuk mendukung KEK tapi prosesnya masih berjalan dan ini sudah cukup lama waktu yang diperlukan untuk itu dan itu memang harapan kita di Mentawai. Karena secara nasional pun ada satu pulau yaitu Pulau Siberut itu sudah ditetapkan sebagai kawasan otoritas wisata nasional, tapi sampai hari ini itu belum ada aksi apa-apa, sementara kita diminta daerah sudah berkomitmen untuk menyiapkan lahan untuk kawasan ekonomi khusus tersebut.

Selanjutnya juga kami informasikan kepada Bapak-Ibu untuk upaya-upaya lain pada saat ini kita berupaya bagaimana kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tersebut, kami sudah coba berkomunikasi baik itu ke provinsi maupun ke pemerintah pusat, bagaimana *resort-resort* yang tadi, artinya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang cukup berani untuk bisa membangun akomodasi di Mentawai, itu bisa keluar dari kawasan hutannya. Karena sebagian besar itu berada di kawasan kuning atau lautan produksi.

Tentu ini akan berpengaruh terhadap kunjungan karena orang-orang mancanegara biasanya selalu berkeinginan ada asuransi dan segala macam sementara kalau izin dari *resort* ataupun akomodasi tersebut tidak ada tentu ini tidak bisa mereka lakukan.



Itulah beberapa kendala dan hal-hal yang kami harapkan nanti disaat penyusunan RUU Kepariwisata pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menitikberatkan untuk tempat wisata tadi itu sangat kami apa namanya kami di daerah sangat mendorong itu, karena memang semuanya itu ada di Mentawai. Ada desa, ada wisata tirta, ada wisata bahari, ada wisata budaya dan juga ada wisata alam yang memang itu yang masih dominan di Kabupaten Pulau Mentawai.

Mungkin itu hal-hal yang kami sampaikan secara materi sudah kami kirim, mudah-mudahan nanti segala masukan dan juga harapan-harapan dari kami Kabupaten Pulau Mentawai bisa terakomodir di dalam penyusunan RUU tersebut.

Terima kasih, kami akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT / F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH./WAKIL KETUA KOMISI X):

Lanjut ke mana ini, Mojokerto ya Pak, silakan Pak.

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO :

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat beserta,
Seluruh Bapak-Ibu Anggota Komisi X,
Yang kami hormati Bapak-Ibu Kepala Daerah dan mewakili,

Yang pertama salam hormat dan mohon maaf karena Bupati kami, Ibu Bupati kami tidak dapat hadir karena kegiatan yang *urgent* di Kabupaten Mojokerto. Kami akan menyampaikan secara singkat karena di PPT maupun di daftar pertanyaan sudah kami jawab dan sudah kami kirim Bapak, saya hanya akan menyampaikan sekilas saja terkait dengan PPT kami.

Kabupaten Mojokerto adalah Kabupaten yang berada sebagai kabupaten penyangga Kota Surabaya yang tidak jauh dari Surabaya, sekitar 40 kilometer atau sekitar 25 menit jika via tol, hingga bandara pun Juanda juga cukup dekat.

Kami punya kekayaan pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang cukup lengkap, hanya satu yang tidak kami punya yaitu pantai. Kami punya candi dan situs kurang lebih 500 baik itu yang masa Mataram kuno sebelum Majapahit maupun di era Majapahit. Kami mempunyai 28 desa wisata, kami punya wisata religi salah satunya adalah Budha tidur yang hampir mirip dengan yang ada di Thailand. Kemudian kami punya 54 wisata kuliner, kami punya 21 wisata alam

dan kami juga punya 20 wisata buatan desa antero 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Jumlah wisatawan di Kabupaten Mojokerto sudah mengalami peningkatan pasca pandemi, jika di tahun 2021 hanya 477.261 orang, di tahun kemarin 2022 sudah bangkit menjadi satu juta lebih wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mojokerto.

Terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Mojokerto, kami memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah terkendalanya pembangunan Taman Majapahit di desa Trowulan, yang sebenarnya pembangunan itu sudah masuk dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2018. Namun karena lokasi yang dipilih dan sudah dilakukan investasi di situ jadi area cagar budaya, zona penyangga, maka itu menjadi kendala bagi kami.

Di Kementerian ekonomi, Pariwisata Ekonomi Kreatif anggaran ini disiapkan untuk tahun 2024 Bapak, jadi dianggarkan di Kementerian Pariwisata dan Ekraf, sedangkan ada satu saja kendala yaitu rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga jalan tengahnya adalah kami harus membuat HIA atau *heritage impact assessment* yang akan kami selesaikan *Insy Allah* di tahun ini sebagai landasan untuk memberikan atau tidak memberikan rekomendasi terkait dengan itu.

Kemudian yang menjadi masalah secara umum di Kabupaten Mojokerto bahwa, lahan yang kami tempati khususnya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten mayoritas adalah milik Perhutani. Sehingga ketika kami merencanakan pengembangan wisata itu akan sangat ditentukan oleh tata ruang yang sudah diatur oleh kementerian lain, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani.

Kemudian kendala di Mojokerto adalah belum adanya *shuttle car* atau trayek pariwisata. Kemudian juga masih kurangnya kesadaran di masyarakat kami. Kemudian yang terpenting juga kami belum memiliki ekosistem pariwisata yang terintegrasi, meskipun secara kasat mata daerah-daerah yang ada di sekitar kami yaitu Sidoarjo, Gresik dan Surabaya sudah sangat banyak yang datang ke wisata kami.

Kemudian harapan kami terkait dengan RUU Kepariwisata yang pertama adalah lebih menekankan atau lebih membuka peluang yaitu keikutsertaan masyarakat di tingkat desa.

Ini pengalaman kami di Kabupaten Mojokerto, kami membentuk desa wisata yang sebanyak 28 itu bahkan diantaranya setiap tahun masuk di 75 besar atau 50 besar ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia yang tahun ini adalah salah satu desa di Trawas, Kabupaten Trawe, itu tidak dalam waktu yang lama. Jadi Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan *support* berupa bantuan keuangan Desa, per desanya minimum satu miliar untuk membangun wisata desanya. Arahnya adalah menjadi desa mandiri, sehingga dalam waktu



kurang lebih 6 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun ini sudah ada 28 desa wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik di setiap skala ada rintisan maju dan ada yang mandiri.

Kemudian kedua harapan terhadap RUU Kepariwisata adalah menekankan pada kerjasama antar daerah kabupaten/kota di dalam pemasaran pariwisata. Terus terang Kabupaten Mojokerto ini dalam wawasan pariwisata belum ada integrasi dengan daerah-daerah yang lain, mungkin sama di beberapa daerah dan masih ada ego kedaerahan untuk mempromosikan pariwisata. Karena kami punya potensi yang luar biasa sementara di daerah tetangga kami Sidoarjo dan Gresik itu sebenarnya minim pariwisata, hanya mereka punya potensi masyarakatnya yang sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi sehingga menjadi pasal yang luar biasa.

Yang ketiga ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, bahwa pemerintah kabupaten/kota mohon untuk diberikan kewenangan pemberian rekomendasi untuk izin pariwisata, karena selama ini kami tidak pernah sama sekali dilibatkan di dalam hal perizinan pembangunan sebuah tempat wisata.

Selanjutnya, mohon ditekankan juga dalam ruang ini membangun jejaring pariwisata yang efektif dalam satu kawasan kabupaten/kota yang berdekatan. Kemudian juga penggunaan sumber daya lokal sangat penting, *monitoring* evaluasi pariwisata baik di daerah pusat. Yang terakhir adalah digitalisasi promosi pariwisata.

Kami di Kabupaten Mojokerto, di halaman sebelumnya sebelum ini, sebelumnya lagi Mbak. Kami punya inovasi yang kami namakan SIDIKARJA atau Sistem Informasi Digital Pariwisata Mojokerto. Ini sudah kami letakkan di hotel-hotel yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto juga di tempat-tempat umum yang tujuannya adalah memberikan informasi yang cukup terkait dengan pariwisata Mojokerto. Ketika kita *scan barcode* ini maka akan keluar objek wisata, objek kuliner dan tempat-tempat yang lain yang sudah kami sinergikan dengan Google Map, sehingga orang bisa tertarik bisa langsung menuju ke wisata ini.

Saya pikir itu Bapak yang bisa kami sampaikan, sekali lagi untuk jawaban yang terkait dengan daftar pertanyaan sudah kami kirimkan secara tertulis untuk mempersingkat waktu.

Kami mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut ke Kabupaten Maros, silakan Pak.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan,
Selamat pagi,

Yang kami hormati Bapak Pimpinan rapat,
Yang kami hormati Bapak-Bapak Anggota Komisi X DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Pimpinan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Teman-teman dari pemerintah daerah yang sempat hadir pada pagi hari ini,

Pertama-tama izin Bapak Pimpinan, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Maros sedianya beliau hadir pada pagi hari ini, berhubung hari ini kami di Maros kedatangan Bapak Presiden itu meresmikan kereta api pertama di Pulau Sulawesi, *alhamdulillah* dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pemaparan Bapak Bupati untuk kegiatan pada pagi hari ini.

Mungkin kami menjelaskan bahwa, letak geografis Kabupaten Maros yang merupakan daerah penyangga Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bandara Sultan Hasanuddin itu berada di Kabupaten Maros dan akses ke pelabuhan Soekarno-Hatta melalui Kota Makassar dari Maros itu ditempuh dalam jangka waktu yang sangat dekat yaitu 30 menit dan *alhamdulillah* pada pagi hari ini sudah di *launching* juga transportasi kereta api yang membuka akses bagi masyarakat yang akan melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Maros, yaitu mengambil salah satu stasiunnya berada di destinasi wisata Rmmang-Rammang.

Dan pada kesempatan ini, kami sangat bersyukur di Kabupaten Maros selain letak geografis yang sangat dekat dari Kota Makassar, akses transportasi darat, laut dan udara itu ada di Kabupaten Maros, kami juga mempunyai keindahan alam yang tidak kalah dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kami punya Geopark Maros Pangkep yang tahun ini sudah di asesmen dan akan diserahkan sertifikatnya oleh UNESCO untuk menjadi global UNESCO global Geopark dan kami mempunyai atraksi seni budaya, mempunyai sejarah yang panjang, kuliner fashion kriya yang mana sesuai dengan rencana induk ke pariwisata yang ada di Kabupaten Maros.

Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang pernah datang ke Kabupaten Maros di tahun 2021. Dipimpin oleh Bapak Ferdiansyah waktu itu dan didampingi oleh Bapak Bupati Maros, langsung meninjau ke destinasi wisata Ramang-ramang yang merupakan destinasi wisata sungai yang ada di Kabupaten Maros dan merupakan salah satu *site* Geopark Maros Pangkep.

Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Andi Muawiyah Ramly yang biasa kami di Maros panggil Bapak Mure. Beliau ini yang selalu membantu kami Pak, membantu kami di Maros setiap kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Maros selalu di-*backup* dengan beliau.



Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, X DPR RI bahwa di kami di Kabupaten Maros sejak 2019-2022 ini perhatian pemerintah pusat ke kami sangat besar, kami mendapat dana alokasi khusus fisik dan non fisik sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Tahun 2003 kami *stop* mungkin ada daerah yang lebih membutuhkan, di tahun 2024 *alhamdulillah* kami dapat dana DAK lagi karena sudah dipanggil oleh Kemenpar untuk membaca, membahas masalah teknis kegiatan tersebut.

Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai materi kepariwisataan di Kabupaten Maros. Bahwa Kabupaten Maros kami mempunyai 24 desa wisata di tahun 2021, di tahun 2022 kami mempunyai 53 desa wisata dan di tahun 2023 meningkat menjadi 55 desa wisata. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Maros mempunyai konsep pembangunan kepariwisataan berbasis di desa. Bagaimana masyarakat diajak ikut peran serta membangun kepariwisataan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kepariwisataan itu berbasis di desa dan *alhamdulillah* perhatian pemerintah provinsi sangat besar dengan dialokasikannya dana bantuan provinsi untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Maros.

Dan pada untuk menunjang kegiatan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Maros, kami di tahun 2022 sudah melaksanakan 45 *event* kegiatan. Di tahun 2023 ini meningkat seiring dengan pembatasan yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah menjadi 63 *event* kegiatan yang akan menunjang kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Maros.

Terus inovasi-inovasi-inovasi yang kami laksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dengan melaksanakan pemasaran pariwisata melalui digitalisasi. Jadi kami mempergunakan digitalisasi sosmed untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Maros dengan melibatkan komunitas pentahelix, ada perguruan tinggi, ada masyarakat, ada industri pariwisata yang ikut serta dalam memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Maros.

Dan khusus untuk, dan khusus untuk pertanyaan dari Bapak-Bapak-Ibu-Ibu Anggota DPR RI Komisi IX, mengenai eh Komisi X Panja Undang-Undang Kepariwisata, bagaimana kondisi kepariwisataan dan permasalahannya. Kami sampaikan bahwa, pengembangan kepariwisataan menyangkut pendanaan sangat berat buat kami. Karena kami kalau memang yang mengandalkan PAD yang sangat minim, tetapi tadi kami sampaikan bahwa *alhamdulillah* perhatian pemerintah pusat sangat besar buat kami di Maros sehingga kegiatan-kegiatan kepariwisataan pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan baik.

Yang kedua, penerbitan izin usaha tadi disampaikan oleh teman-teman dari daerah bahwa izin usaha kepariwisataan itu dikeluarkan secara OSS, tetapi kebetulan Bapak Bupati kami, sudah mendudukkan kami bersama dengan di instansi terkait dalam hal ini PTSP perizinan supaya membentuk regulasi yang, supaya membentuk regulasi bagaimana setiap sebelum



perizinan itu terbit ada pertemuan-pertemuan rapat dengan instansi teknis yang dilibatkan. Termasuk juga ketika itu sudah diterbitkan ada informasi atau dalam bentuk pelaporan yang disampaikan ke kami dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan *alhamdulillah* permasalahan-permasalahan di wilayah yang kami temukan itu sudah tidak terjadi lagi.

Pembangunan kepariwisataan di daerah kami menjadi prioritas pengembangan sumber daya manusia bentuk pelatihan-pelatihan kompetensi dan sejak 2019 kegiatan DAK non fisik kami sudah laksanakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Maros.

Dampak dan keuntungan dari atau tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata yaitu, pengelolaan yang menjadi masalahnya masyarakat. Terus terang kami di Kabupaten Maros baru 10 tahun terakhir ini bicara kepariwisataan. Karena kami di Kabupaten Maros masyarakatnya masyarakat agraris, penembak, yang 10 tahun ini kami merubah kultur menjadi masyarakat pariwisata, menjadi tantangan buat kami juga.

Makanya *alhamdulillah* di Kabupaten Maros kami mendapat dana bantuan DAK non fisik untuk melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan membantu mengubah *mindset* masyarakat yang agraris menjadi masyarakat pariwisata.

Dana alokasi APBD dan APBN 3 tahun terakhir ini tadi sudah saya sampaikan *alhamdulillah* bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangat besar buat kami di Maros. Mungkin dari Pak Amure yang membantu kami-kami tidak tau juga Pak tiba-tiba dapat DAK langsung diundang. Mungkin itu yang untuk dana bantuan pusat *alhamdulillah* kami berterima kasih Pak atas dukungannya.

Apakah ada terdapat disharmonisasi peraturan terkait penyelenggaraan kepariwisataan yang menghambat penyelenggaraan pemerintah daerah?. Jadi tidak ada kami temukan permasalahan Pak dari Undang-Undang aturan yang ada di buat pemerintah pusat. Karena itu tadi kami selalu melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif apabila ada permasalahan-permasalahan teknis di lapangan.

Terus nomor 5, sejauh mana pembangunan kepariwisataan di daerah dalam memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keunikan dan kekhasan budaya alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata?

Jadi perlu kami sampaikan bahwa, konsep dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Maros mengutamakan desa wisata, karena dari desa wisata itu masyarakat akan menjaga kearifan lokal, budaya dan atraksi budayanya itu mereka kembangkan dan *alhamdulillah* dari 55 desa wisata itu sudah ada beberapa desa yang bisa memberikan beasiswa dari hasil pengembangan destinasi wisatanya dan ada salah satu desa sampai sudah memasuki tahun ketiga dan itu memberikan



bukti kepada desa-desa yang lain bahwa, dengan mengembangkan sektor pariwisata bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat yang ada di desa tersebut.

Bagaimana upaya Dinas Pariwisata, organisasi pariwisata dalam mempromosikan mengembangkan pariwisata daerah? Kami melaksanakan pengembangan promosi pariwisata melibatkan pentahelix, karena kami tahu membangun pariwisata itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak termasuk dengan teman-teman media massa, teman-teman penggiat pariwisata. Kalau dikerjakan dengan sendiri dari dinas itu lama prosesnya Bu dan *alhamdulillah* kami di Maros membentuk tim kreatif, tim kreatif itu memang tugasnya mempromosikan, mem-*blow up* sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Maros dan itu lebih menarik buat pengunjung.

Karena selama ini kami survei kalau kita mengambil konten-konten yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang menarik, tetapi ketika dibuat oleh teman-teman tim kreatif akan menambah daya tarik. Makanya ketika kami membuat sosmed tidak menggunakan nama pemerintah kabupaten tetapi kami langsung buat *visit* Maros supaya lebih menarik buat dikunjungi para wisatawan atau orang yang ingin ke Maros.

Terus penyusunan RUU Kepariwisata, bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap penyusunan. Jadi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, kami terus terang selama ini yang menjadi kendala untuk pengembangan kepariwisataan itu lahan, karena lahan yang akan kita bangun rata-rata itu berada di kawasan Taman Nasional. Hampir 90% di Kabupaten Maros itu menjadi lahan Taman Nasional, di samping lahan-lahan masyarakat ada 10%.

Jadi kita kerja samakan Pak Bupati mengarahkan kami untuk bekerjasama dengan masyarakat menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah desa, nanti dari pemerintah desa diarahkan ke kami untuk dihibahkan ke kabupaten. Nanti dari kabupaten itu yang meminta untuk dilampirkan ke pemerintah pusat sebagai tanah daerah dan *alhamdulillah* itu yang memancing untuk mendapatkan dana alokasi khusus, karena kami tahu di teman-teman di daerah itu tidak mempunyai lahan untuk dikembangkan.

Jadi kami sudah melaksanakan beberapa destinasi wisata dibangun menggunakan dana alokasi khusus, tanah berasal dari masyarakat yang sudah dihibahkan ke pemerintah daerah, tetapi ketika sudah dilaksanakan pembangunan masyarakat itu akan mendapat bagi hasil daripada pemasaran destinasi wisata tersebut.

Jadi melalui desa wisata, jadi kembali lagi ke desa wisata nantinya yang mengelola desa wisata tersebut memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan. Jadi mereka yang mengatur regulasinya bagaimana pembagiannya dan *alhamdulillah* itu sudah berjalan beberapa tempat desa wisata yang ada di Kabupaten Maros dan kami melibatkan juga Taman Nasional, kami punya destinasi wisata alam Bantimurung yang sangat terkenal. Di tahun 2019 kami dapat PAD 9 miliar, di tengah pandemi Covid di tahun 2021 kami dapat 5 miliar,



ini kemarin di 2022 sudah membaik dapat 6 miliar, jadi sudah mulai bangkit, itu cuma satu destinasi dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Jadi kami mengelola melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan UMKM yang ada di Bantimurung.

Mungkin itu Pak, Ibu Anggota DPR RI Komisi X. Dari yang terakhir kami berharap dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Karena tujuan kita sama-sama bisa mensejahterakan masyarakat dan kami berharap dengan adanya Undang-Undang ini peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan itu diberikan ruang yang besar. Karena kita sangat berharap bahwa perencanaan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan itu memang melibatkan masyarakat secara *full*. Kami dari pemerintah cukup menjadi fasilitasi bagaimana kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di daerah.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT / F-PDI PERJUANGAN (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maros memang indah ya dan di sana ada peninggalan apa museum kita pernah datang ke sana ya, tapi sayangnya kita belum sempat pergi ke Geopark-nya karena waktu, tapi mungkin ada yang tertarik mau pergi ke Geopark Maros, belum ya, mau ke, lagi. Jadi tahun ini rencana kita satu ke Tanah Datar, satu ke Maros juga ya, belum. Urutkan ini.

PEMERINTAH DAERAH:

Ibu Pimpinan, saya mohon izin saya meninggalkan ruangan karena ada kegiatan di kementerian, mohon izin Pimpinan bila berkenan saya menyerahkan ke Pimpinan.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Ya *monggo-monggo*, maju dulu minta pasukan fotonya.

Kita lanjutkan kembali, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu Ibu Hetifah sudah hadir. Dari Samarinda, pemerintah kabupaten eh kota, akhirnya Pak Wakil Walikota tadi sudah menunggu harap-harap cemas, ini Ibu saya hadir apa *nggak* ya Pak.

Silakan Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso menyampaikan paparannya.



WAKIL WALIKOTA SAMARINDA (Ir. H. RUSMADI, M.S., Ph.D.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati kami banggakan Pimpinan Rapat, khususnya Bu Hetifah ini, Anggota DPR, Anggota DPR Komisi X, Bapak-Bapak Bupati, Walikota, dan peserta rapat yang berbahagia,

Pertama, izin terkait dengan pokok-pokok pertanyaan yang disampaikan kepada kami yaitu terbagi dua hal. Pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemudian yang kedua adalah substansi daripada Rancangan Undang-Undang Kepariwisata. Oleh karena itu mohon izin untuk menyampaikan secara singkat melalui *slide*, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian mendapatkan gambaran terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Tentu di bagian pertama kami terima kasih apresiasi kepada Komisi X yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pemerintah kota, karena tidak semua kabupaten/kota ini diberikan kesempatan dan sependapat dengan rencana perubahan Undang-Undang Kepariwisata ini. Yaitu yang tidak saja mendorong untuk kesempatan berusaha pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tetapi juga sekaligus kepariwisataan ini digunakan sebagai sarana dalam rangka untuk memelihara sejarah, adat istiadat dan nilai budaya bangsa sebagai warisan peradaban bangsa.

Bapak-Ibu sekalian,

Samarinda memang tidak luas 716 kilometer persegi dengan penduduk 850 ribu tetapi dengan posisinya Kalimantan Timur sebagai ibukota negara *insyaallah* ini akan meningkat secara cepat dan mudah-mudahan menjadi kota metropolitan, *aamiin*.

Samarinda ini memang memiliki karakteristik khusus, sama dengan Palembang ini dibelah dengan Sungai Mahakam dan Samarinda sekarang ini memang didominasi ekonominya oleh sektor tersier, bahkan hampir 56%. Jadi dari sektor perdagangan dan jasa.

Saat ini memang ke pariwisata di Kota Samarinda ini belum memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada penerimaan daerah, ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan yang baru memang mencapai 212 ribu. Tadi Palembang 1 juta 500, tetapi *insyaallah* ini IKN tahun depan upacara 17 Agustus pertama dihadiri oleh Bapak Presiden, Palembang *insyaallah* lewat ini nanti.

Posisi Samarinda ini strategis karena posisinya dalam ekosistem tiga kota pembangunan apa pembangunan ibukota negara ini sebagai apa, sebagai jantung. Jadi ini bisa membayangkan kalau jantung tidak berdetak berarti IKN ini sulit untuk diwujudkan.



Oleh karena itu, secara singkat kami sampaikan potensi yang ada di Samarinda sesuai dengan visinya ke depan adalah dalam rangka untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban sehingga potensi wisata yang kita kembangkan adalah potensi wisata yang tidak saja berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, berkaitan juga dengan budaya.

Mungkin bisa ditampilkan pertama perhatian pemerintah. Pertama adalah terhadap wisata tirta, wisata air, yaitu susu, Sungai Mahakam. Bisa ya di halaman 4 berikut ya. Terus lanjut, lanjut satu lagi, ya ini posisinya Samarinda sebagai apa sebagai tiga sistem, 3 kota dari pembangunan IKN.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini Sungai Mahakam ini adalah merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Kapuas ya di Kalimantan Barat, tetapi Sungai Mahakam ini apa mengingatkan kita akan sejarah-sejarah nasional. Karena di hulu daripada Sungai Mahakam ini kita ingat di abad ke-4 ini ada kerajaan Hindu tertua sehingga susur Sungai Mahakam ini tidak-tidak sekedar hanya untuk Menikmati keindahan sungai, keindahan alam, tetapi ini juga berkaitan dengan sejarah kerajaan tertua di apa di Indonesia, sehingga susur sungai ini juga *trip*-nya itu ke Museum Mulawarman ya, itu merupakan kerajaan Kutai Kartanegara, kemudian juga ke situs Kerajaan Kutai lama yang abad ke apa ke-13, juga ke Muara Taman, di mana ada situs prasasti Yupa.

Tetapi jujur Bapak-Ibu sekalian ini, belum mendapatkan perhatian secara serius, padahal ini adalah merupakan sejarah peradaban dunia. Dan sebagai informasi susur sungai ini masih dengan menggunakan kapal-kapal yang dulu digunakan ke hulu Mahakam, ke Kota Bangun, kemudian ke Melak, kemudian ke perbatasan ke mana ke Long Bagun, dimulai di akhir 2016 tetapi sekarang sudah ada 6 kapal.

Mudah-mudahan seiring dengan penambahan penduduk, ini kapal-kapalnya sudah merupakan kapal-kapal modern dan pemerintah kota ada berencana untuk kemudian apa, membeli kapal pinisi dalam rangka susur Sungai Mahakam ini menjadi memang susur sungai yang apa yang mengesankan. Kemudian berikutnya, Samarinda juga dilengkapi dengan apa wisata belanja, kemudian yang paling penting juga susur ini wisata religinya.

Bapak-Ibu sekalian,

Samarinda memiliki ini memiliki masjid tertua di Samarinda, bangunannya masih asri dibangun tahun 1881, jadi sudah hampir 200 tahun dan kemudian kalau lihat di bawah itu ada Islamic Center, rasanya sekarang ini masih tercatat sebagai ini masjid terbesar kedua se-Asia Tenggara.

Jadi dari wisata religi kita ada menampilkan masjid sirotol mustaqim, kemudian Islamic Center-nya yang merupakan masjid terbesar dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan wisata budaya.



Bapak-Ibu sekalian,

Jadi kalau Samarinda, Kalimantan, itu kita pasti ingat dengan apa dengan suku etnis lokal yaitu Dayak, tetapi yang berbeda kalau kita ingin mengunjungi apa Kampung Dayak yang asli ini tentu jauh aksesnya dan Samarinda memiliki sudah Kampung Dayak, ini adalah merupakan migrasi dari masyarakat atau kayan gulungan sejak tahun 1973.

Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin melihat masih wanita dayak dengan kuping panjang, kemudian dengan tarian-tarian yang tradisional dengan adat istiadatnya tidak jauh ini hanya sekedar apa sekitar 10 kilometer dari pusat kota ke Taman Budaya Pampang ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian kita mengundang ini bukan saja susur sungai Mahakam tetapi juga ini ke desa budaya Pampang.

Nah kemudian kita ada Festival Mahakam ya, Festival Mahakam. *Nah* rencana bulan Juni di setiap tahun kita ada festival adat Pampang dan kalau dilihat di sudut kanan itu ada juga kampung tenun, ini mengingatkan kita akan sarung Samarinda, kalau Bapak ingat belangai itu ada yang disebut dengan belang Hatta, belang Hatta, karena proklamator kita Pak Hatta ini tahun 1961-an tertarik untuk apa,uu tertarik dengan belang merah dengan bercampur hitam sehingga disebut dengan belang-belang Hatta.

Tapi saya lupa tadi menitipkan pesan untuk membawa sarung Samarindanya bagi Anggota Komisi, mudah-mudahan kalau datang *Insyallah* ya.

Kemudian untuk wisata buatan kita akan mengembangkan wisata alam, kita punya apa punya RPH sebenarnya tapi luasnya sekitar 30 hektaran, ini berpotensi untuk menjadi sebuah kawasan ekonomi terpadu dan kemudian dalam rangka untuk mempercantik di sepanjang Sungai Mahakam sebagai wisata unggulan ke depan, wisata sungainya. Lanjut, kita juga akan membangun apa yang disebut dengan teras Mahakam.

Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk susur Sungai Mahakam ini menjadi sebuah apa sebuah destinasi menarik. Jadi kalau dengar tadi Sragen dapat dukungan DAK 2,7 triliun untuk membangun poltekpar. Kemudian tadi rasanya Maros dan apa dan Palembang tadi dapat dukungan, rasanya sudah waktunya juga untuk Samarinda apalagi sebagai kota penyangga untuk mendapatkan dukungan, terutama memang susur sungainya.

Ini berbeda dengan Palembang, dengan Sungai Musinya, apalagi Sungai Mahakam ini terpanjang kedua di Indonesia dan kalau melihat sungai Mahakam yang bebas daripada bangunan permukiman sepanjang Sungai Mahakam itu, sepanjang sungai itu adalah sungai Mahakam. Jadi mohon maaf Palembang mudah-mudahan menunggu waktu saja kan lewat ini untuk menjadi kunjungan wisata.



Ini saya kira, tetapi dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah tidak apa ini tidak mudah memang dihadapkan dengan sejumlah masalah. Saya kira untuk masalah sama dengan apa kota/kabupaten lain, kita dihadapkan dengan apa dengan keterbatasan infrastruktur. Kita memiliki bandara, bandara Apt Pranoto itu Bandara Internasional tapi sejak dibangun 2017 kemudian *flight* pertama sampai sekarang belum ada penerbangan internasional. Termasuk Balikpapan walaupun sudah ada penerbangan internasional tetapi saat ini di masa pandemi setelah pandemi ini belum ada penerbangan internasional sehingga aspek konektivitas ini saya kira perlu untuk mendapatkan perhatian.

Kemudian untuk anggaran sendiri APBD kita memang masih kecil 1,9 untuk Dinas Pariwisata yang sekarang berdiri sendiri. Kemudian dukungan APBN juga ini belum apa belum-belum ada. Mudah-mudahan nanti mendapatkan dukungan dari Komisi X apalagi dengan posisi strategis Samarinda sebagai kota, sebagai penyangga, sebagai mitra daripada ibukota negara.

Dan terakhir terkait dengan beberapa substansi dari Rancangan Undang-Undang Kepariwisata. Pertama adalah terkait dengan bagaimana tanggapan pemerintah daerah atas rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pada prinsipnya Bapak-Ibu sekalian bahwa, Undang-Undang nanti yang akan disusun tentang kepariwisataan ini, ya pastinya kita harapkan semua daerah adalah yang mampu mendorong apa percepatan akselerasi dari para penyelenggaraan kepariwisata di daerah, tetapi tentu kami memiliki harapan untuk tetap memberikan perhatian terhadap keselamatan daripada wisatawan, tetapi juga di sisi lain ini tetap memberikan perhatian terhadap aspek kelestarian mutu lingkungan dan budaya.

Kemudian yang kedua terkait dengan *urgency*, hal yang paling mendasar dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, saya kira kembali kepada tolak ukur keberhasilan daripada penyelenggaraan kepariwisataan daerah ini adalah jumlah kunjungan. Sehingga kalau kita bicara jumlah kunjungan ini pastilah apa daerah-daerah wisata ini adalah merupakan daerah-daerah yang abstraktif gitu. Kemudian aksesnya mudah, kemudian dukungan daripada apa perhotelan, kemudian restoran, kuliner, ini juga memberikan dukungan, selain juga aspek kelembagaan terutama kelembagaan yang terkait dengan apa lembaga profesi, organisasi profesi.

Kemudian undang-undang yang perlu untuk mendapatkan perhatian saya kira dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini karena Samarinda ini lebih diuntungkan dengan sumber daya alamnya, terutama terkait dengan kota yang dibelah oleh banyak sungai sehingga undang-undang yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati ekosistem, kemudian tadi benda cagar budaya termasuk aspek penataan ruang perlu untuk mendapatkan perhatian.



Kemudian yang keempat terkait dengan tugas pemerintah. Saya kira Pemerintah Kota Samarinda sekarang sedang bersiap untuk menyusun rencana induk pariwisata daerah. Apalagi rencana induk pariwisata provinsi baru saja ditetapkan sehingga sudah bisa digunakan dasar dan Samarinda ini telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata provinsi berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 sehingga ini bisa menjadi dasar utama. Karena tentu kami berkeinginan bahwa wisata ini tidak sekedar destinasi wisata tetapi menjadi sebuah kawasan wisata dalam-dalam konteks industri wisata sehingga keterkaitan satu dengan sektor yang lainnya perlu mendapatkan perhatian.

Kemudian terkait dengan Undang-Undang Kepariwisata ke depan yang mengatur keberadaan wisata tirta atau sungai, wisata bahari, wisata budaya dan wisata alam, saya kira pemerintah kota Samarinda memberikan dukungan, karena kebetulan potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda ini adalah sungai, kemudian tadi dengan sejarah dan budayanya.

Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan dan tentu kami berharap dari apa yang disampaikan oleh Bupati, Walikota tadi bahwa, orang Rancangan Undang-Undang Kepariwisata ke depan ini haruslah bermuara kepada upaya untuk pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan demikian paparan sudah komplit semua, sekarang giliran dari para Anggota Panja RUU Pariwisata Komisi X, ini tadi yang belum saya perkenalkan ada hadir tambahan baru Ibu Illiza dari PPP, daerah pemilihan Aceh di pojok sana cantik itu Pak.

Kemudian Ibu Dewi Coryati nih yang selalu berminat kemanapun ada yang indah-indah langsung ngacung saya mau pergi.

Terus kemudian Pak Nur Purnama Sidi dari Golkar.

Terus Pak Andreas Pariera dari PDI Perjuangan dan Ibu Hetifah yang kita tunggu-tunggu dari tadi sudah hadir. Ke Samarinda juga kita ya, jadi tahun ini ada 3 target pariwisata juga nih.

Oh iya Pak El Nino, ini calon gubernur dari Partai Gerindra.

Kita mulai apakah ada tanggapan, saran dari para Anggota Komisi X, kita mulai dari Pak Rano Karno.

Silakan Pak Rano Karno.



F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Bang senior,
Bang Andre, izin duluan,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada 8 kabupaten/kota dan provinsi. Hari ini kita berkumpul karena kami Komisi X ini sedang menyusun satu rencana Undang-Undang tentang Kepariwisata. Wisatawan yang lalu, wisata bahari itu *nggak* masuk, sehingga marilah barangkali Bapak-Ibu sekalian kita lihat saja secara kasat mata.

Indonesia ini negara kepulauan laut, laut begitu luas, tapi apakah kita lihat kapal-kapal pesiar ada di sini, tidak ada. Sementara wisata bahari ini punya potensi yang sangat besar, sehingga di saat pada waktu peresmian Mandalika diresmikan kekurangan hotel terjadi di mana-mana.

Waktu itu saya mengusulkan kepada Menteri Pariwisata, kalau memang tidak punya hotel lagi, jual *enggak*, minta tolong dengan Angkatan Laut untuk mengirim kapal perang, undang kapal-kapal pesiar. *Nah* artinya, setelah itu kita paham "Oh ternyata ini wisata bahari ini perlu pakan".

Nah, konteks utama pada RUU ini kita ingin mengembangkan pembaharian. Karena itu barangkali terima kasih saya 8 kabupaten/kota ini hadir, Manado tadi. Kita sudah taulah infrastruktur di wilayah seperti apa, karena itu kalau kita ingin mengembangkan misalnya wisata bahari dengan kehadiran kapal-kapal pesiar besar. Apakah Manado ini bisa disinggahi atau Mentawai bisa disinggahi? Kayaknya belum kapasitas pelabuhannya kan, berarti kita harus berpikir bahwa ini Kementerian PUPR juga harus berpikir kalau bandara oke, beberapa kota/kabupaten sudah punya bandara tapi kalau laut ini kayaknya belum.

Makanya tadi kalau saya mencatat seperti tadi dari Walikota Manado, hampir rata-rata Palembang juga hampir rata-rata masalah konektivitas adalah utama, betul ini adalah yang utama. *Nah* itulah makanya. *Nah* itulah makanya barangkali.

Kemarin saya baru pulang dari Belanda Pak, tugas juga kunjungan perorangan. Pesawat yang begitu besar, Garuda itu hanya sekali satu minggu, sekarang baru ditambah Pak, karena memang jujur saja pandemi dan kekuatan ekonomi negara. Oleh karena itu, inilah pentingnya saya sangat berterima kasih ini semua kalau tenaga ahli telah mencatat masukan-masukan.

Manado dengan dengan wisata lautnya, kemudian Palembang dengan wisata sungainya, kemudian apa namanya dengan wisata alamnya, kemudian Bupati Sragen tadi saya tidak mendengar potensinya apa tapi mungkin Bu, Ibu-Ibu Ketua pasti akan tau. Mentawai dengan wisata bahari bahkan ada 72 *spot surfing*, *nah* ini kalau dikembangkan kan luar biasa, bahkan Mentawai pun telah

membebaskan 2000 hektar untuk kawasan ekonomi pariwisata, *nah* sementara Banten baru saja meresmikan Pak.

Jadi kan artinya kemudian Maros ini sayang saya belum sempat ke kampung Bung Andi ini, saya penasaran nih mau lihat geopark-nya dan memang saya tau kemarin saya lihat di televisi ada kereta tapi *track* tunggal ya Pak ya, baru hanya satu ya. Jadi kelihatan lucu juga itu kereta kayak-kayak apa ya kaya *jet coster* kepalanya satu balik lagi gitu kan, itu memang baru rencana satu atau memang rencana dua? Baru rencana satu, tapi menarik buat objek-objek pariwisata tapi memang saya lihat oh ini kayanya belum menjadi alat transportasi. Karena kalau transportasi kan kurang kan, kurang panjang, itu hanya berapa, perasaan cuman 4 gerbong ya? Iya kan berarti kan kurang dayaampungnya kan, tapi saya lihat di televisi menarik. Ternyata baru pertama kali ada kereta api di Sulawesi Selatan, itu berkat Bung Andi yang minta jangan ragu dalam Buang Andi.

Jadi sekali lagi barangkali ini masukkan yang sangat luar biasa Pak, kita mengapresiasi di tengah bulan puasa Bapak pun datang dengan kunjungan walaupun jawaban sudah kami terima juga, tapi dengan kehadiran ini nanti kita berpikir minimal 8 yang hadir ini DAK kita tambahkan, yang *nggak* datang rugi. Jadi kita *nggak* pertimbangannya gimana caranya mengembangkan berdasarkan potensi yang memang ada.

Karena saya lihat sekarang kita mungkin baru punya 5 prioritas. Sebetulnya Indonesia bukan hanya 5 prioritas ini banyak, cuman Manado yang utama. *Nah* jadi barangkali memang Panja ini dibentuk untuk men-*develop* peningkatan wisata bahari, cuman bahari itu ada sungai, ada alam.

Jadi sekali lagi, barangkali saya seperti Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih, Bapak berkunjung dan sempat datang undangan ini. Karena kami anggap pariwisata itu akan menjadi devisa nomor dua Pak setelah mungkin minyak, tapi sayangnya pariwisata kita juga Kementerian Pariwisata kita juga anggarannya juga dibabat habis, itu juga tidak membuat dia bisa bergerak bebas.

Tapi Pak kunjungan wisman di tahun 2023/22 kemarin melebihi target itu yang menjadi menjadi aneh bagi kita. Makanya saya kemarin bilang sama Kementerian, tolong dianalisa mengapa ini bisa target kunjungan melebihi.

Jadi mungkin sekali lagi terima kasih itu saja.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,



Semangat sekali ya Pak Rano, mudah-mudahan yang hadir ke sini bisa kita usulkan semuanya untuk dapat tambahan DAK sehingga memberi semangat bagi kabupaten/kota lainnya untuk mengungkapkan kebutuhan, termasuk dalam upaya memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Pariwisata ini.

Selanjutnya Pak Andreas silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu-Ibu, teman-teman Anggota Panja Komisi X,
Para Kepala Daerah atau mewakili Kepala Daerah yang kami hormati,

Mendengar presentasi dari Bapak-Bapak itu seperti apa cerita apa beragam cerita tentang kekayaan budaya alam, ya semua yang kita punya di Republik ini gitu. Jadi kalau kita atau bandingkan dengan negara-negara yang lain, seperti halnya kalau orang tanya itu jangan tanya Indonesia apa yang Indonesia punya gitu tapi apa yang Indonesia tidak punya, itu lebih tepat pertanyaan terhadap Indonesia, karena kita punya semua gitu. Ya laut, gunung, alam yang indah, budaya yang indah dan itu semua potensi pariwisata.

Cuma memang kalau kita jujur harus membandingkan misalnya dengan daerah lain negara lain sebagai Turki, jangankan jauh-jauh Turki dengan Thailand aja dalam soal pariwisata kita ketinggalan dan pengembangan pariwisata. Sehingga memang mengapa kita pertanyaan pertama mengapa kita ketinggalan? Kita bangga dengan semua yang kita miliki tapi kita kalah di dalam apa fakta kita mengelola pariwisata ini gitu.

Kami ke Turki tahun lalu, akhir tahun lalu itu Turki itu sudah apa jumlah kunjungan wisatanya sudah 50 juta, kita 2 juta aja kita udah teriak-teriak senang senang gitu. Jadi sebenarnya ada yang salah gitu di kita ini. Ada yang salah di dalam pengelolaan pariwisata yang kita banggakan ini. Ini harus jujur kita kemukakan dan kita sadari bersama begitu.

Oleh karena itu, memang inilah juga salah satu alasan kami membuat apa mau merevisi Undang-Undang Pariwisata ini, karena banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang yang sekarang yang perlu diperbaiki sehingga ini mendorong percepatan perubahan ini dan pariwisata ini kebijakannya di pusat gitu, tapi kan pariwisata itu ada di daerah. Tidak ada pariwisata apalagi mau bilang Jakarta gitu, mau apa mau pening di Jakarta gitu, tidak. Jadi pariwisata itu sebenarnya ada di daerah, lebih banyak ada di daerah, kalau mau kita benahi Jakarta apa destinasi pariwisata, itu juga bisa gitu tapi pariwisata lebih banyak di daerah.

Jadi sebenarnya ada di Bapak-Bapak, ada di teman-teman yang di daerah, cuma itu tadi gitu banyak hal yang apa tidak-tidak apa tidak sinkron dengan apa yang kita harapkan gitu.



Oleh karena itu, dari penjelasan tadi saya kira Bu Ketua kita itu buat perintah di dalam undang-undang ini bahwa kita perlu punya *big data*, bahwa undang-undang ini harus mempunyai pesan tentang *big data* pariwisata, *big data* kepariwisataan di seluruh Indonesia dengan segala macam jenisnya. Sehingga dengan demikian kita punya ini punya apa referensi punya inventarisasi-inventarisasi data dan persoalan di pariwisata di seluruh Indonesia. Saya kira ini perlu masukkan dalam catatan, ini usulan saya.

Kemudian hal yang berikut Pak, satu hal yang juga kami lihat di dalam ini mohon masukkan juga dari Bapak-Bapak, karena ini Panja ini kami lebih baik ingin mendengar dan memperoleh masukkan.

Kelemahan yang kami rasakan itu soal kelembagaan. Kelembagaan ini menyangkut hubungan pusat dan daerah, kemudian dan hubungan pusat dan daerah yang soal kewenangan yang tadi Bapak-Bapak sampaikan. Soal kewenangan, soal koordinasi lintas, kalau di pusat itu lintas Kementerian dan Lembaga. Kalau di daerah itu seperti tadi Pak salah satu Bupati mewakili Kepala Daerah lintas daerah, lintas kabupaten, lintas kota gitu. Karena dengan otonomi daerah ini juga kemudian meng apa, menjadikan kendala gitu di dalam urusan pariwisata. Sementara pariwisata itu adalah mobilitas kan, itu yang akan kita rasakan misalnya di kawasan destinasi-destinasi prioritas sekarang ini gitu.

Di Borobudur, di Labuan Bajo dan di apalagi di Toba gitu, sehingga memang antar lintas daerah ini juga kemudian menjadi kendala, karena tiap Kepala Daerah mempunyai otoritas masing-masing itu. Bahkan ada di beberapa tempat yang kami perhatikan egosentris daerah itu menjadi penghalang. *Nah* ini yang kami perlu mendengar masukkan sehingga kita selesaikan di sini.

Kemudian juga soal tata ruang, tata ruang tadi. Saya senang sekali dari Pak Walikota Samarinda ya wakil wali menyampaikan bahwa, di sepanjang Sungai Mahakam itu tidak ada bangunan, tidak ada bangunan, jadi memang semua arah ke sungai. Kalau memang itu luar biasa Pak, yang terjadi kan di kita ini justru banyak kendala bangunan-bangunan yang menghambat keindahan alam itu gitu.

Nah ini kan sebenarnya wilayah daerah gitu, ini satu contoh aja gitu. Jadi menurut saya daerah itu harus menjaga walaupun belum dibangun jaga jangan sampai dirusak gitu, itu tugas daerah. Jadi daerah perlu menjaga kawasan-kawasan itu yang perlu juga diatur di sini gitu. Jadi sebelum dibangun itu jangan sampai dirusak, karena apa laut yang indah itu akan rusak ketika orang membangun untuk membangun berbagai macam jualan apa-apa di sepanjang pantai, sepanjang sungai, akhirnya ketika mau dibangun susah lagi gitu.

Nah ini kan yang tidak alami misalnya di Toba kemarin dengan apa *power boat*-nya gitu, dan itu juga harus masuk di dalam undang-undang, daerah mempunyai kewajiban melalui Perdanya menjaga kawasan-kawasan itu gitu, karena ini terjadi di mana-mana, kalau-kalaupun dapat disampaikan di Samarinda tadi pengecualian dan syukur senang itu mendengar itu.



Kemudian soal konservasi, memang ini juga hal lintas Kementerian dan Lembaga ini, ini yang misalnya terjadi di beberapa daerah soal konservasi alam, budaya, cagar alam, sejarah.

Banyak sekali apa, ya kita melakukan pembiaran-pembiaran sementara itu ada di daerah gitu. Jadi menurut saya ini harus dikawal oleh daerah. Kemudian apakah itu kebijakan dari pusat tapi daerah yang harus bertugas untuk mengawal ini. Soal anggaran kita bisa atur gitu, tapi bagaimana ini supaya harus diselamatkan banyak hal konservasi-konservasi yang menyangkut kepentingan kepariwisataan ini gitu.

Jadi ya itu unsur-unsur konkret dari Bapak-Bapak ini penting, karena menurut saya kita bicara pariwisata kita bangga-bangga tapi kalau poin-poin penting ini kita tidak jaga, tidak rawat, ya kita akan tetap ketinggalan terus seperti ini gitu. Karena banyak hal yang kita punya kemudian menjadi apa hilang *lost* karena kita tidak melakukan manajemen yang baik tentang pariwisatanya.

Saya kira dari sini kita mulai untuk membenahi, sama-sama ini tugas kita sama-sama. Kami menyusun undang-undang ini, ya masukkan dari Bapak-Bapak sehingga ya kita punya apa *output* nanti yang benar-benar bagus gitu. Soal DAK dan yang lain-lainnya itu saya kira gampang itu, kalau-kalau ini kita apa tata ini benar-benar.

Karena Kementerian dan Kementerian Pariwisata sendiri pun mereka merasakan bahwa, mereka kan istilahnya apa kalau di-di apa di kalau kami orang NTT orang Flores bilang besar dinamo berarti ongkos gitu, artinya ceritanya ribet-ribet Pariwisata tapi soal ongkosnya parah gitu karena anggarannya kecil gitu.

Jadi kurang lebih ini yang saya kira kita apa ya mungkin ada masukan dari Bapak-Bapak sebagai bahan diskusi kita, saya kira ini penting untuk kita perkaya RUU ini, draft RUU ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Andreas.

Banyak hal diberikan masukan dan pertanyaan, selanjutnya Pak Nur Purnamasidi silakan Pak.

F-GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak dari yang saya hormati,



Terima kasih atas masukan dari sampaikan yang cukup lengkap beberapa kolega saya sudah menyampaikan beberapa hal. Saya ada dua hal yang sebenarnya ingin saya diskusikan sama Bapak, satu terkait dengan pariwisata yang berbasis sungai, Pak. Utama di Samarinda sama Palembang.

Tentu sungai itu ada ujungnya, ada hulu ada hilirnya. Saya termasuk yang hampir setahun ini mendorong Kementerian Parekraf untuk menginisiasi adanya kerjasama pariwisata. Misalnya Samarinda itu pastikan punya sungainya dari beberapa kilometer itu tentu kan tidak semuanya milik Kota Samarinda, begitu juga dengan Palembang.

Mungkin Bapak pernah ke Kuta Pak, ketika musim-musim hujan itu Kuta itu kalau pagi itu kedatangan sampah minimal 5 ton yang berasal dari Banyuwangi, dari daerah sekitar. Sama juga mungkin di Palembang atau di Samarinda, yang itu mungkin di Samarinda atau Palembang kan sudah ditata betul tapi tiba-tiba dari hulu misalnya itu ada banyak sampah atau kemudian sistem apa drainase yang ada di sekitar itu belum.

Nah ini kalau kemudian tadi ada rencana induk tentang kepariwisataan, apakah itu termasuk Pak, misalnya bagaimana kemudian ada MoU, ada kerjasama antar daerah yang ada di sepanjang sungai itu, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa sungai itu dari ujung sampai ujungnya lagi memang betul-betul tidak mengganggu apa program kepariwisataan.

Kalau kita lihat di luar negeri kan dari ujung sampai ujung, itu ya sungainya bersih. Kalau di Indonesia, kita masih melihat di kota bersih sekali, tapi ketika keluar kota dikit itu sudah mulai banyak itu.

Tadi yang disampaikan Pak Hugo Pariera, saya ingin tahu apakah sudah ada inisiasi ke situ atau tidak, karena ini menurut saya penting untuk dimasukkan dalam beberapa Perda. Karena kalau tidak maka ya tadi itu, sudah rapi, anggaran sudah miliaran dikeluarkan, tiba-tiba besok pagi menjadi rusak gara-gara tidak ada kerjasama perencanaan pariwisata dengan misalnya kabupaten/kota yang ada di sebelahnya.

Nah saya mungkin butuh masukkan itu, apakah itu dilakukan atau kalau memang sudah dilakukan kira-kira seperti apa, kalau pun belum kira-kira apa kendala sehingga nanti bisa menjadi masukan kami untuk menjadikan normanya di dalam undang-undang, itu satu Pak.

Yang kedua, beberapa daerah juga menyampaikan satu *problem* adalah kawasan pariwisata itu sebagian sudah dimiliki oleh rakyat atau hak ulayat. Di Palembang, di Palembang itu sudah bagus, tapi ketika masuk parkir sebelah kiri ada markas tentara Pak kan gitu, yang masuk di situ dan itu mengganggu mengganggu narasi dari bangunan itu kan begitu.

Ini terjadi di mana-mana termasuk di dapil saya Pak di Lumajang, itu ada namanya tumpak sewu itu Pak, tumpak sewu itu sudah terkenal internasional. Jadi ada air terjun, ada seribu air terjun itu menjadi satu, tapi itu tanahnya dimiliki oleh 11 masyarakat, 11 orang.



Di Danau Toba kemarin ketika kami juga melakukan kunker, salah satu *problem* kenapa wisata apa *super* prioritas itu tidak bisa dikembangkan maksimal karena urusan tanah itu, urusan makam yang harganya sudah lebih dari 10 miliar kalau dipindah segala macam seperti itu.

Menurut saya ini juga menjadi *problem* kita semua, Pimpinan. Jadi kami mungkin dari-dari praktek itu yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak selama ini mensiasati seperti apa, mungkin perlu disampaikan Bapak-Bapak. Sehingga nanti ini pun bisa menjadi norma kami, menjadi norma bagi kami kira-kira apa sih atau mungkin ada *succes story* dari Bapak-Bapak menyangkut bagaimana kemudian menangani itu sehingga kemudian masyarakat betul-betul mendukung.

Kayak di Mojokerto sebenarnya saya melihat situs-situs yang digali dari peninggalan Majapahit ini kan relatif lebih muda dibanding-dibanding pribadi di daerah saya di Jember dan Lumajang. Jember-Lumajang, di Lumajang itu ada situsnya apa Lamajang Tiga Juru, itu perkampungan itu kalau kita gali itu ada-ada apa ada pernik-perniknya, ada piringnya segala macam itu. Karena dahulu tempat kekuasaannya Arya Wiraraja tapi itu rusak, beda dengan misalnya di Mojokerto.

Succes Story dari apa yang Bapak-Bapak lakukan selama-selama ini mungkin perlu kami dengar, sehingga ini menjadi masukan bagi kami untuk bagaimana kemudian juga menjadikan itu sebagai sebuah norma di dalam undang-undang.

Mungkin itu Pimpinan sebagai tambahan dari-dari diskusi kita pada siang hari ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Nur.

Selanjutnya Bu Ledia silakan. Gerindra *enggak*? Atau mau siapa dulu, *enggak* usah urut partai, siapa yang datang duluan siapa yang mau bicara duluan, wah kalau begitu dari tadi begitu.

F- GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Saya sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Pak Nuroji silakan.



F-GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati juga,
Para Bapak-Bapak Bupati dan Walikota,

Sedikit saja dari yang saya catat tadi delapan kabupaten/kota yang menyampaikan ada dua hal yang saya lihat satu yang disampaikan tentang potensi kita cukup berbangga ya, ternyata disampaikan cukup besar potensi pariwisata kita ini di daerah menjadi harapan kita ke depan.

Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi, saya pikir ada beberapa yang saya catat ya, hampir sama ya setiap daerah salah satunya misalkan terkait dengan aktivitas, kemudian promosi, harmonisasi peraturan. Ini memang sangat penting ya, banyak terjadi karena peraturan yang saling tidak mendukung dan berbenturan tugas kita nanti dalam penyusunan RUU ini dengan undang-undang yang baru bahkan. Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali yang belum disinkronkan dengan peraturan-peraturan Menteri dan juga undang-undang yang lain.

Seperti di OSS yang juga hasil dari Cipta Kerja ini masih banyak persoalan. Setiap pengusaha yang mau ngurus NIB dan perizinan itu terkendala misalkan terkait dengan KBRI-nya *nggak* ada ya, tercantum dalam OSS jadi ini belum-belum harmonis, belum-belum tersedia dalam sistem yang baru ini. Di bidang pariwisata kemarin juga Pak Menteri akui, banyak bilang-bilang industri pariwisata sendiri yang belum ada KBRI-nya di OSS.

Selain OSS itu juga ternyata memang sulit menggunakannya mungkin, karena terlalu besar atau gimana tetapi saya di lapangan menemukan juga praktek-praktek yang tidak jujur. Artinya ini di apa namanya, dipermainkan sehingga harus melalui calo-calo atau notaris untuk pengurusannya dan saya mengalami hal itu, ini satu kelemahan juga dari sistem online kita yang sebetulnya mestinya mempermudah.

Kemudian terkait dengan konektivitas tadi, *flight* ini yang dulu ramai sekarang tidak ini, Garuda terutama yang sepengetahuan saya memang ada persoalan di pesawat Garuda yang saat ini tidak mencukupi karena saat pandemi itu Garuda mengembalikan *leasing*-nya kepada *lessor-nya*. Jadi pasca pandemi untuk mengembalikan pesawat itu ternyata pesawatnya sudah di-*leasing*-kan kembali ke pihak lain untuk penumpang lain sehingga Garuda kadang menunggu pesawat baru untuk bisa disewa. Ini cukup panjang waktunya, itu salah satu kendala yang tadi Bapak-Bapak sampaikan.

Kemudian yang lain juga penting, promosi dukungan dari pusat ya ini penting juga, dengan anggaran terbatas daerah tentu saja perlu bantuan pusat.

Kemudian integrasi antar daerah, ini memang sudah jadi kebutuhan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Terkait satu kota dengan yang lainnya seperti misalkan kemarin di Cirebon kita bicara. Ini juga antara Kota Cirebon



dengan Kabupaten Cirebon sangat beririsan sekali mengenai objek wisatanya. Juga mungkin daerah lain tadi disebut daerah Mojokerto dan sekitarnya terkait dengan wisata budayanya mungkin perlu ada integrasi antar daerah.

Saya rasa Pimpinan itu secara singkat yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Nuroji.

Selanjutnya Puang Andi silakan.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Bapak-Ibu semuanya dan,
Bapak-Bapak narasumber kami 8 orang,

Terakhir tadi sahabat. Muhammad Ardiansyah, S.IP Kepala Dinas Pariwisata Maros mewakili Bupati dan Wakil Bupati. Jadi Bu informasi, kemarin saya ditelepon oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati sekaligus dua-duanya untuk kaitannya kehadirannya karena ada Pak Jokowi tidak bisa hadir di sini. Tapi saya kira tadi cukup representatif apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Cuma satu yang dilupakan saya pernah membawa Pak Menteri Pariwisata anda *ndak* sebut itu ya di-di Ramang-Ramang.

Dan karena seperti Bapak-Bapak yang lain, salah satu kuncinya sebetulnya Bapak-Bapak untuk mendapatkannya macam-macam tadi itu ya Bapak apa undanglah Pak Menterinya ke daerah Bapak. Di Mentawai misalnya sudah datang belum Pak Menterinya, seperti di Maros itu tiba-tiba waktu saya mendatangkan Pak Sandiaga itu langsung Pak Bupatinya nego-nego, akhirnya dapat *tower* untuk itu apa nama *tower*, karena jaringan ini masih kurang langsung di sana itu. Jadi itu Pak ada namanya ilmu pendekatan mungkin dalam artian positif itu, itu saya pikir itu.

Highlight saja Bapak-Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini kita Panja Ketuanya Ibu Agustin, perdebatan kita kemarin bukan perdebatan sebetulnya, diskusi awal kita. Apakah yang akan kita buat ini RUU ini revisi undang-undang atau memang undang-undang baru, kalau di atas 50% perubahan artinya ya baru semuanya nantinya.

Karena kita ini memang pengalaman tidak mendapatkan suatu hal yang banyak nilai tambahnya dengan Undang-Undang yang lama itu. Karenanya Panja ini dengan memasukkan dari Bapak-Bapak semuanya itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna.



Empat pendapat masukan tadi itu, delapan orang tadi yang macam-macam bervariasi tapi intinya mulai dari konektivitas, masalah SDM, masalah tanah, masalah dan yang lain-lain. Misalnya kita yang paling lengkap tadi itu dari tanah datar Sumatera Barat itu, itu lengkap sekali. Sudah ada apa namanya jadwal agenda, satu nagari satu *event* itu ada-ada satu juta pengunjung tahun ini, kemudian ada 10 wisata unggulan, ada 200 potensi wisata, ada Perda-Perda ada wisata halal, ada pelayanan terpadu.

Saya lihat-lihat kaya begini nih Bu, karena apa, di Indonesia ini sebetulnya semua daerah, semua desa punya daerah wisata, cuma sesuatu yang unik-unik itu yang dicari orang. Apakah turis itu *nggak* pernah melihat laut pantai di Paris, woi banyak lebih indah sebetulnya, lebih indah di sana.

Apakah misalnya *ndak* pernah melihat gunung di sini, oh gunung-gunung di sana lebih bagus Pak, tapi ada sesuatu yang unik yang akan datang dia lain dari tempatnya yang ada itu di tempat asalnya, mau melihat sesuatu yang unik dan yang unik-unik itulah yang dicari.

Karenanya sebetulnya masalah keunikan kedua tadi infrastruktur itu sebetulnya itu nomor 3, yang paling penting sesuatu didatangi itu yang harus pertama dan utama kesediaan masyarakat. Masyarakat *very welcome* ga terhadap yang mau datang, ramah *enggak*, senyum *enggak*, bersih *enggak*, itu yang kaya gitu faktanya, yang lain-lainnya pendukung saja yang utama tapi karena.

Di Borobudur misalnya di daerah Magelang itu ada hotel paling mahal tanpa listrik, tanpa ada listriknya karena memang datang ke situ turis untuk *healing* gitu melihat puncaknya Borobudur. Paling mahal itu Bu, Jiwa apa namanya itu Jiwa, saya pernah di ajak teman ke sana 4 juta per malam tidak ada listriknya, *nggak* ada itu ya malah khusus untuk itu ya Pak yang dari MAGelang tau itu.

Saya pikir hal-hal yang keunikan-keunikan inilah yang penting dan *alhamdulillah* 8 Bapak-Bapak di Bupati, Wakil Bupati ini memiliki itu. Misalnya contoh konkrit Ramang-Ramang. Ramang-ramang itu paduan antara karts dengan sungai, ada sungai. Saya bukan apa-apa sebenarnya yang lalu saya tarik kirim saya kirim fotonya Bu itu penyelamatan saya Bu, penyelamatan untuk sebuah area namanya Selendrang dekat pantai sana itu. Karena datang lagi apa yang namanya pembangun-pembangun itulah untuk mendobrak, menghancurkan gunung-gunung itu untuk mengambil batunya dan kapur. Ya kita selamatkanlah, selamatkan dan juga masa depan, masa depan itu masa depan sekali lagi.

Ya unik ini cerita Bu, sebentar satu menit lagi. Pas malam itu viral di seluruh koran Sulawesi, apa namanya Anggota DPR termiskin dari Sulawesi Selatan adalah Amure. Itu koran di mana-mana termiskin, hartanya di KPN cuman sekian-sekian, yang terkaya ini, beda jauh dan langit.



Dia *nggak* tau saya punya lokasi-lokasi pariwisata Pak yang ke depan itu mungkin 10 tahun yang akan datang di atas miliaran. Baru kemarin, baru kemarin, baru kemarin saya dengan Pak Kepala Desa, mantan Kepala Desa, mantan, Pak Nasir, Pak Nasir, itu ada foto-fotonya itu.

KETUA RAPAT:

Lonjakan harga tanahnya itu yang membuat kenaikan.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Saya membayangkan kita di tengah batu-batu itu Nabi Adam dengan Hawa dulu lagi ngumpat di situ ini.

Jadi begini yang intinya terima kasih Bapak-Bapak semuanya masukkan dari Bapak-Bapak semuanya tadi itu memberikan nuansa baru bagi kita ya Bu ya, dari Panja ini. Jadi memberikan masukan, karenanya itu tadi kuncinya Bapak-Bapak semuanya. Saya melihat ada yang lengkap dari 23 contoh saja saya tidak bicara yang lain, 23 kabupaten, 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan itu semuanya punya keunikan.

Bulukumba misalnya dengan perahu pinisi, Bira terkenal itu sejak berabad-abad yang lalu, kemudian Maros contohnya punya kupu-kupu, punya kupu-kupu terbesar di dunia, Bu. Semua kupu-kupu dari sekecil kuku sampai sebesar meja ini ada, iya. Jadi bisa ditanyakan Bu, jadi seluruh peneliti-peneliti asing itu datang ke situ hanya untuk melihat kupu-kupu endemik, kupu-kupu terbesar di dunia itu ada air terjunnya, ada.

Satu hal lagi yang Ibu pesan tadi, ada tempat-tempat manusia paling tua lebih tua dari Mesir, jadi ada goa, ada gambar-gambar goa 4000 tahun yang lalu, sudah ada manusia di situ, jadi sudah berbudaya orang Bugis itu. Melukis goa macam-maca itu, itu 4000 tahun yang lalu menurut penelitian dari Universitas di Australia, *nah* yang kaya gini-gini kan unik.

Nah Bapak-Bapak semuanya, ini keunikan ini keunikan bahari tadi seperti oleh Bang Dul tadi keunikan ini. Karenanya anu juga sebetulnya Ibu saat melihat pengalaman ini tergantung dari Pimpinan daerahnya sebetulnya. Kalau ada nangkap bola punya kepedulian itu punya hobi wisata, suka kuliner, suka apa-apa, ngundang orang macam-macam itu-itu, tapi kalau yang *enggak* punya hobi juga susah.

Nah Maros ini kelihatannya Bupatinya sangat-sangat *well* sangat apa namanya *welcome* untuk orang-orang datang itu mempromosikan-mempromosikan daerahnya dan itu luar biasa, karena hanya 40 menit dari bandara sudah sampai kita di semua daerah-daerah sekitar wisata itu ya. Mungkin karena keluarga saya itu Bupatinya. Salam ya dari saya.

Dari saya mungkin itu saja saya sampaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Ada yang mau pergi ke Maros, tapi harus nginep Pak, supaya bisa ke Geopark.

Selanjutnya monggo Mbak Eva silakan.

F-NASDEM (EVA STEVANY RATABA, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan juga,
Bapak-Ibu Anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X,
Yang saya hormati Bapak-Bapak para narasumber,
Bupati, Walikota atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini,

Seperti yang kita ketahui bahwa daya tarik wisatawan terhadap destinasi wisata di suatu daerah itu sangat ditentukan dengan pengembangan kepariwisataan yang di dalamnya memuat tentang pembangunan infrastruktur dan juga pemeliharaan objek wisata, juga pendampingan pemberdayaan masyarakat lokal dan juga pengelolaan mitigasi krisis.

Jadi mungkin usulan kami dalam Undang-Undang Kepariwisata ke depan ini perlu mengatur tentang prosentase anggaran pengembangan kepariwisataan daerah berdasarkan tipologi daratan dan juga perairan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing, karena memang maju tidaknya suatu pariwisata di suatu daerah itu, tergantung pada kebijakan pimpinan daerah dengan topangan dan dukungan dari pemerintah pusat.

Yang berikutnya terkait dengan pengelolaan tata ruang destinasi wisata yang berkolerasi dengan kebijakan lintas institusi pemerintah, seperti kebijakan pengelolaan ruang laut untuk kelautan, pesisir dan pulau kecil, tata kelola sungai oleh balai besar wilayah sungai, kehutanan oleh Perhutani dan juga cagar budaya.

Oleh karena itu, pengaturan terkait kerjasama lintas pemerintah ini harus dilakukan secara komprehensif. Dalam Undang-Undang Kepariwisata ke depan, agar dalam pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan kepariwisataan ke depan ini akan menjadi selaras dan tidak terjadi tumpang tindih sehingga hasilnya diharapkan mampu menopang perekonomian di suatu daerah.



Dan sedikit pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak semua, apa saja yang merupakan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi perizinan soal wisata ini, Pak.

Demikian dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, dilanjutkan mungkin Ibu, oh Ibu Ledia dari Fraksi PKS.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi X yang berbahagia,
Bapak-Ibu para tamu narasumber,
Para kepala daerah,

Terima kasih atas presentasi yang disampaikan, luar biasa ada banyak *insight-insight* baru ya bagi kita sebagai Anggota Komisi X dan Panja RUU tentang Kepariwisataan.

Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, temuan kami beberapa kali dalam kunker terutama kaitannya yang pantai dan sisi sungai, tepian sungai Bapak-Ibu. Kalau kita lihat bab kepemilikannya gitu, kepemilikan lahan itu pengaturannya ada di mana, siapa yang mengatur dan membatasinya?

Kita tidak ingin mengalami hal yang dialami oleh Pulau Penang Malaysia, Pantai Ferringhi nya itu tidak ada satupun yang bisa menjadi milik publik, sementara kita lihat kalau tidak salah di Sanur ada jalan di Bali, ada jalan pantai itu benar-benar tidak dimiliki oleh siapa-siapa orang bisa berjalan, berjalan berlari-lari gitu di pinggir pantai dengan nikmat, dengan nyaman di belakang hotel.

Di Belitung kemarin apa namanya Pak Wakil Bupati menyampaikan, mereka tidak bisa mengelola sama sekali padahal di situ termasuk ada geosite di pinggir pantai tetapi itu milik swasta. *Nah* apakah Bapak-Bapak juga mengalami hal-hal yang demikian? Karena ketika kemudian dimiliki oleh swasta kan kita jadi tidak bisa mengelola dengan baik itu ya. Kita tidak bisa mengelola mengembangkannya dengan baik, itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang cagar budaya ada banyak tadi Bapak-Ibu yang menyampaikan bahwa ada situs-situs bersejarah, ada-ada apa namanya pelajaran-pelajaran besar di sana? Apakah ada

komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait situs-situs cagar budaya tersebut sebagai pusat sumber belajar? Karena kan itu sebenarnya bisa dijadikan satu paket ya pusat sumber belajarnya apa namanya dengan situs-situs budaya dan sejarah.

Misalnya seperti tempat pembuangan Bung Karno di Ende di dapilnya Pak Andreas, eh dapilnya siapa itu Pak? Itu kan bisa jadi pusat sumber belajar, tapi ternyata tidak dilakukan gitu oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, tidak menjadikan itu sebagai salah satu target. Akhirnya kan situs-situs tersebut cuma dikunjungi, sehabis itu foto-foto, catat-catat dilupakan, tidak jadi pusat sumber belajar. Padahal itu kan sebenarnya bisa jadi satu paket pariwisata dan pendidikan gitu. Maksud saya, apakah Bapak-Ibu bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini ataukah ada komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan berkaitan dengan ini?

Pertanyaan yang ketiga adalah apakah daerah-daerah wisata yang tadi Bapak paparkan itu memiliki apa namanya, fasilitas ramah untuk penyandang disabilitas. Kalaupun belum ada kira-kira kesulitannya di mana.

Mungkin kalau ke Ramang-Rammang memang agak susah ya Bang ya kalau harus yang ramah disabilitas. Orang kita aja saya aja udah terguling-guling di situ apalagi pas hujan itu, itu sudah bisa dibayangkanlah bukan perkara yang mudah, tetapi buat yang kira-kira memungkinkan untuk disampaikan oleh penyandang disabilitas, apakah bisa atau sudah dibuatkan fasilitas untuk ramah disabilitas.

Berikutnya, ketika kita bicara soal wisata sungai atau wisata bahari tadi kan berkali-kali disebutkan merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah dicabut. Yang ada adalah Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memang ada-ada bagian yang bicara tentang pariwisata.

Cuma hal yang mendasar menurut saya, di undang-undang tersebut menghilangkan pasal eksisting tentang 30% wilayah hutan, wilayah konservasi di daerah aliran sungai. Padahal ketika kita mau bicara wisata sungai tentu bab konservasi ini menjadi penting.

Tadi Pak Nur makanya tanyakan dari hulu ke hilirnya gimana gitu, sementara di undang-undangnya itu sudah dihapuskan. Apakah ada misalnya peraturan daerah yang sengaja dibuat untuk memastikan bahwa wisata ini akan berjalan dengan baik, wisata sungai ini akan berjalan dengan baik.

Tapi kalau yang digambarkan oleh Pak Nur kan kalau di Eropa yang kasus almarhum putranya Gubernur Jawa Barat itu kan sedang berenang, karena memang di Bern itu memang sungainya jernih dan orang berenang di situ bolak-balik jadi hiburan tersendiri gitu, *healing*-nya mereka dengan itu. Coba kita kalau disuruh berenang di Cikapundung. Kalau di Cikapundung udah langsung pada rundung, langsung pada sedih di situ ya, susah karena di Cikapundung di Bandung itu banyak sampahnya, ya jadi ini bagian yang

Yang terakhir, apakah juga pemerintah daerah telah siap ketika kemudian wisatawan internasional hadir mekanisme, sistem pembayaran, sistem pembayaran yang *cashless* gitu. Apakah itu sudah siap juga pemerintah dan bagaimana kesiapan masyarakat berkaitan dengan itu? Karena makin ke sini kan ternyata banyak hal yang apa harus *cashless* ya berkaitan dengan pembayaran dan pembelian.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Bu Ledia.

Ini mengingatkan kita ya betapa wisata alam Indonesia itu sebenarnya sangat menarik tetapi apa ya pelestariannya ya yang kurang mendapatkan perhatian, tapi kalau kira-kira kabupaten/kota diminta untuk menyelesaikan ya *nggak* ya Pak. Karena kalau pembersihan sungai misalnya kayak di kawasan Sumatera Barat itu sungainya apa Pak, lebar banget eh iya.

Terus ini ya Mentawai, itu juga pinggir-pinggir pantainya itu walaupun sudah menjadi wisata apa *snorkeling* sama ini, tapi kebersihannya juga belum terjaga dengan baik ya Pak, karena kalau kabupaten saja menurut saya pasti tidak akan mampu menyelesaikan hal itu.

Selanjutnya masih ada siapakah, si cantik dari.

Silakan Bu Illiza.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Syukur pada Allah dan shalawat pada Rasulullah.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X,
Para Bupati, Walikota atau yang mewakili dari 8 daerah,

Yang pertama, kami mengapresiasi atas kehadiran, atas paparan yang telah disampaikan. Tentu menambah wawasan kami tentang kayanya, tentang potensi wisata di Indonesia dan kami juga mengucapkan apresiasi juga kepada tanah datar yang di mana telah memiliki Perda tentang wisata halal. Yang kita cukup berbahagia Indonesia masuk ke peringkat kedua untuk dunia untuk wisata halal dan target dari Pak Sandi bahwasanya ke depan Indonesia menjadi tempat pertama, kalau sekarang didominasi oleh Malaysia.



Dan sejauh mana daerah-daerah lain yang hadir ini juga menangkap tentang keberadaan wisata halal ini? Jadi wisata halal bukan mengislamisasi wisata, tapi memfasilitasi kebutuhan para wisata muslim yang hadir di daerah kita, baik tempat ibadah, makanan halal dan sebagainya, transaksi keuangan. Jadi ini memang seharusnya bisa ditangkap oleh daerah kabupaten/kota untuk mempersiapkan sebanyak mungkin wisata muslim ini bisa hadir ke daerah kita.

Dan kemudian juga bagi daerah yang belum Repardanya belum selesai ini menjadi suatu keharusan, kewajiban, kalau kita ingin mentargetkan agar persoalan wisata ini betul-betul bisa terukur dalam penyiapannya. Ya selama ini kan sering sekali daerah-daerah itu ingin memajukan wisata, tapi *nggak concern*.

Sebagaimana mungkin yang disampaikan oleh teman-teman, bagaimana menyiapkan tempat sampahnya, ya dari sisi kebersihan, bahkan pokdarwisnya. Kan kalau kita ke daerah pokdarwis semangat tapi baju pokdarwis pun *nggak* ganti-ganti gitu ya dengan pakaian yang kurang menarik, warnanya sudah ini lusuh sekali gitu ya. Karena itu hal kecil, tapi sesuatu hal kecil itu berdampak terhadap selera orang untuk bisa berkunjung.

Kemudian pasca pandemi ini kan ada tren yang berubah gitu dari wisatawan yang berkunjung ke daerah kita, yang tadinya mungkin menikmati satu tujuan, tapi sekarang lebih suka dengan alam misalnya dan ya tentu ini juga harus ditangkap juga oleh daerah-daerah untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas dan kalau biasanya orang menargetkan satu-dua hari ya ke depan itu harus bisa lama mereka ada di sana. Kalau kita bisa menangkap mereka bisa hadir di tempat daerah kita lama, maka uangnya akan dihabiskan juga cukup besar gitu ya dan tentu itu mendapatkan *income* bagi masyarakat.

Kemudian pengembangan wisata desa wisata. *Nah* ini juga sebetulnya desa wisata itu kan *nggak* rumit-rumit sekali, bukan yang harus punya pantai yang indah, bukan hal-hal seperti itu, tapi yang meng-*create* itu dengan budaya lokal itu juga sesuatu hal yang menarik karena Indonesia itu kaya sekali. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan kami mengapresiasi, tapi bagaimana ke depan ini bisa menjadi betul-betul prioritas. Karena ketika wisata itu maju ini kan *multiplayer effect* terjadi di daerah kita.

Apa contoh saja dulu Banyuwangi saat saya menjabat sebagai Walikota Banyuwangi itu Pak Azwar Anas itu *nggak* pernah berhenti bicara tentang wisata, kita presentasi tentang hal lain dia itu terus dan ternyata Banyuwangi itu majunya kencang sekali gitu. Karena apa karena fokus kalau memang ada fokusnya memang kita memfokuskan benar-benar kita fokus. Apalagi sekarang ini orang berwisata itu kan bukan hanya satu target yang ingin dicapai tapi banyak sisi yang mau di-*explore* oleh para wisatawan yang hadir.

Nah saya juga belum bisa melihat misalnya bagaimana keterlibatan *influencer* di dalam mempromosikan wisata. Kan sekarang digitallisasi ini agar memudahkan kita mempromosikan wisata kita dan sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan, seluruh sekarang ini potensi wisata itu apapun bisa menjadi potensi. Jadi



jangan lihat dari *scope* yang kecil, yang sempit, tapi harus lebih besar kita melihat hal itu.

Apalagi Samarinda ini yang sedang bersiap diri. Saya dulu pernah ke sana, dulu pernah Kakak saya jadi PJ di sana Pak Tarmizi Al-Karim. Jadi ya kan kalau Balikpapan dengan Samarinda agak tomlang dulu, mudah-mudahan. Sekarang udah karena memang waktu-waktu saya pertama itu Bu Hetifah, saya belum pernah ke Samarinda, jadi dari Balikpapan saya ke Samarinda, awalnya suami saya lebih duluan ke sana. *Nah* saya berpikiran saya itu Samarinda itu mudah untuk saya menjangkau Samarinda, ternyata saya harus melewati Bukit Soeharto gitu ya Pak, sampai muntah di jalan Pak makanannya susah banget saya dapat, cuma dapat tahu, itupun kelewatan gitu ya.

Jadi ini kan ini kan maksudnya mau menjadi IKN ini Pak, *nah* si tahu-tahu itu kan bisa bertambah-tambah yang lainnya tapi kuliner itu dicatat sedemikian rupa ya, sehingga makanan-makanan yang disajikan dengan tepat yang menarik itu sudah harus dibuat perencanaan yang cukup baik.

Karena saya mengalami itu, karena suami saya pertama bilang sama sebelum berangkat beli dulu makanan di Balikpapan, saya bilang “lah ngapain gitu ya, Samarinda kan Ibukota pasti lebih bagus dari Balikpapan”. Karena saya belum pernah jadi saya mengatakan hal itu dan saya *nggak* dengerin apa yang suami saya bilang, saya *enggak* beli makanan, kelaparan saya itu Pak di sana dan ternyata tahulah yang ada ya tahu yang yang paling ada di pinggir jalan itu.

Nah jadi memang kami berharap mudah-mudahan perencanaannya begitu betul-betul detail dan matang dalam mempersiapkan itu, pasti kunjungan wisata itu sangat besar sekali.

Sekarang kita melihat kalau kita ke *airport* itu wisatawan kita walaupun dibilang 2023 ekonominya akan menurun dan sebagainya tetapi yang bersemangat untuk wisata itu sekarang luar biasa. Jadi pesawat-pesawat semua penuh dan sebagainya apalagi kalau IKN sudah mulai maju gitu ya.

Mungkin itu terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Prof, kok datangnya bersama Ibu Ima habis rapat Fraksi ya Prof? Ya walaupun demikian mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau Ibu Ima. Bernafas dulu atau mau Ibu, ya.



F-GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Sekaligus saya untuk me-review untuk Prof.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Ibu Hetifah.

F-GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Terima kasih, Ibu Ketua,
Pak Fikri dan,
Teman-teman Anggota, dan tentu saja,
Para narasumber yang hebat-hebat dari berbagai daerah,

Jadi Prof tadi kita mendapatkan paparan dari 8 daerah ya, pemerintah daerah yang memberikan kita satu khasanah, berbagai potensi, kemudian juga apa upaya-upaya strategi inovasi yang sudah dilakukan, termasuk juga mungkin harapan atau keluhan terkait berbagai tantangan di lapangan.

Jadi semua ini menurut saya sangat bermanfaat informasinya agar ke depan dengan adanya Undang-Undang Pariwisata yang diperbaiki ataupun yang baru nanti payung hukum yang ada itu bisa mendorong berkembangnya pariwisata di daerah-daerah. Tentu saja kuncinya adalah sinergi dan kerjasama. Oleh sebab itu saya mau bacakan satu pantun.

Sungai Musi adanya di Palembang,
Sungai Mahakam di Samarinda,
Kalau pariwisata mau berkembang,
Sinergi dan kerjasama itu kuncinya.

Nah inilah yang membuat Undang-Undang ini jadi perlu gitu antar pemerintah daerah sendiri, misalnya kasus daerah aliran sungai, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah pusat sendiri misalnya Kementerian Pariwisata ekraf dengan Kementerian-Kementerian lainnya dalam pengelolaan suatu kawasan pariwisata, dan lain-lainnya.

Nah jadi Bu Agustina, nampaknya ini tidak mudah ya pekerjaan kita, tetapi saya yakin Undang-Undang nanti jika data-data dari perspektif pemerintah daerah ini benar-benar dimanfaatkan dan banyak pertanyaan tadi dari teman-teman Anggota. Mudah-mudahan nanti walaupun tidak semuanya dikemukakan secara lisan Bapak-Bapak semua, berkenan untuk memberikan tambahan informasi secara tertulis gitu, tapi kalau masih bisa nanti kita dengarkan tentunya dengan sangat senang hati kita mencatat ini sebagai masukan yang sangat berharga.

Saya sendiri merasa tadi catatan yang paling penting adalah terkait dengan kewenangan dan juga masalah pendanaan ya mungkin. Pendanaan ini penting sekali Bu gitu. Jadi bagaimana agar apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah daerah itu bisa terfasilitasi dengan baik dan tentu saja walaupun



sudah ada DAK nampaknya tidak cukup mekanisme insentif, insentifnya harus lebih luas lagi. Jadi bukan hanya DAK.

Kalau sekarang kan jika daerah sudah punya apa rencana induk pariwisata daerahnya dia jadi bisa diberikan kesempatan mendapatkan DAK. Jadi akhirnya kita juga bersemangat untuk menyelesaikan reparaanya. *Nah* tapi bentuk-bentuk insentif disentif itu sebenarnya sangat penting instrumennya nanti dikembangkan ada berbagai cara Bu ya, termasuk supaya pariwisata tadi berkelanjutan, tidak merusak, kemudian juga dampak ekonominya terasakan langsung ke masyarakat lokal. Jadi bukan hanya investor-investor dari luar saja yang membawa atau yang hendak menikmati manfaatnya Pak dan saya tentu saja secara khususnya mengundang teman-teman kita ke Samarinda.

Ya kan hayu dong begitu ya, nanti naik kapal itu ya Pak ya naik kapal, kemudian nanti mampir ke kampung tenun sarung itu, ke masjid Ibu. Sebenarnya itu Masjid itu bagus sekali dan sangat bersejarah, saya kira banyak yang menarik dan sebenarnya satu titipan kami juga Pak. Karena tidak ada kota di Indonesia yang seperti Samarinda beruntung mendapatkan hutan kota yang luasannya puluhan hektar itu Pak walaupun itu belum menjadi. Sekarang kan ya masih belum betul-betul dioptimalkan, tapi sebenarnya itu.

Nah jadi tahu dan kuliner lokal maupun ekraf lainnya itu juga masih banyak yang harus dikembangkan, karena sarung menarik tetapi untuk menjadi oleh-oleh dirasa masih cukup mahal Pak Kepala Dinas. Jadi kalau hanya mengandalkan sarung sebagai oleh-oleh tentunya kurang pilihannya, tapi sarung itu sangat luar biasa sekarang apa perkembangannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan juga.

Baik mungkin itu saja Bu saya kira, pesan-pesan dan juga apresiasi kami kepada para narasumber, semoga ini tidak pertemuan yang terakhir. Karena tadi kita berjanji ya yang datang 8 ini Prof harus tentunya kita berikan apresiasi setidaknya dengan kita berkunjung ke sana, sehingga kalau kita sudah berkunjung mengetahui betul apa yang diharapkan dan dibutuhkan untuk kemudian nanti kita perjuangkan bersama.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Jadi semangat kita ya.

Silakan Pak Prof Djohar Arifin.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih, Pimpinan.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan beserta Anggota,
Tamu-tamu yang berbahagia,

Mohon maaf saya terlambat karena ada kegiatan. Saya ingin memapakan ini di bagian ini barangkali banyak di tempat kita jadi belum diusulkan, tolong dipaparkan.

Ya ini sangat-sangat menyedihkan, ya ini mereka menyambung nyawa untuk ke sekolah karena tidak ada sekolah di sana, ini menjadi perhatian ya menyeberang. Lanjut yang lain, *video* yang lain, ini kan nyawa ini kasihan. Yang lain, *video* yang lain Mas. *Nah* ini yang tadi. *Nah* ini anak-anak TK yang dibawanya ya setiap hari ini, Allahu Akbar. Oke yang lain, *video* yang lain. Ya ini di daerah-daerah kita dan ini banyak sekali seperti ini ya seperti ini juga, oke ini lanjut, ya udahlah lewatkan itu, *nah* satu lagi yang terakhir. Bagaimanakah mereka menyambung nyawa untuk melewati sungai.

Ini banyak di tempat saya saja ada 12 di kabupaten saya. Jadi saya berbicara dengan Kementerian dan Komisi V, kalau jembatan tidak bisa APBN ke situ tapi kalau titik gantung ini dibenarkan.

Jadi mohon Pak Bupati menyampaikan kepada desanya, kadesnya kalau titik gantung laporkan kirim ke kita gitu ya. Jadi ini saya menyedihkan masyarakat kita sudah sekian tahun merdeka masih menyambung nyawa juga mau pergi ke sekolah.

Ini aja, terima kasih Bu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, apakah masih ada Anggota, jika tidak berakhir gongnya oleh Pak Wakil Ketua Komisi X Pak Fikri silakan. Iya tambah waktu kita sudah kelewat 30 menit.

Iya sementara pukul 3 kita harus Raker dengan Kemendikbud, jadi 15 menit ya Pak tambahan dari sekarang.

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH./WAKIL KETUA KOMISI X):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Ibu Ketua.



Pimpinan dan Anggota Komisi X,
Bapak para narasumber dari Maros, Mojokerto, Mentawai, Kepulauan
Mentawai, Tanah Datar, Samarinda, Manado, Palembang dan Sragen,

Hanya mengingatkan saja karena ini kan prosesnya masih eh sudah-sudah lama dan nanti akan lama lagi juga. Bapak-Bapak itu, Bapak-Ibu itu yang dibutuhkan buat kami adalah supaya nanti regulasi ini bisa dilaksanakan di bawah, jangan sampai dibuat di sini tapi kemudian nanti menyulitkan.

Nah itu yang sekarang misalnya antara tadi yang dikeluhkan, tadi disebut-sebut misalnya Undang-Undang Cagar Budaya, yang di situ ada cagar budaya. Bapak-Ibu dari kabupaten/kota sekedar lampu rusak atau pagar rusak itu *nggak* bisa APBD mengalokasikan. *Nah* ini kan berarti harus ada sinkronisasi antara-antara Undang-Undang Cagar Budaya dengan-dengan Undang-Undang Pariwisata. Kemudian nanti *link* lagi juga dengan Undang-Undang Pemda.

Nah ini yang maksudnya Bapak-Ibu, ini nanti ada apa istilahnya biro hukum atau apa di setiap kabupaten/kota diminta untuk nguliti satu-satu, untuk supaya nanti memberikan masukan riil. Ini menyulitkan ini, *point* ini menyulitkan bagi kami begitu, bahkan mungkin nanti akan jadi delik buat kami malah salah gitu, jadi temuan-temuan BPK dan sebagainya.

Sebut saja misalnya, tapi *nggak* ada *nggak* ada Magelang ya, Magelang misalnya ya Magelang misalnya kita ke sana, kemudian pemerintah provinsi kabupaten/kota mengeluhkan-mengeluhkan, kenapa karena tadi. Jadi di cagar budaya. Tadi kan saya tadi ada yang cagar budayanya ada, *nah* di cagar budaya itu-itu di Undang-Undang Cagar Budaya itu ada Badan Pengelola, Badan Pengelola Kawasan. *Nah* iya kawasan cagar budaya.

Badan pengelola itu sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Kalau ada badan pengelola maka ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten/kota dan ada masyarakat, nanti masuk dalam badan apa badan pengelola itu. Tapi kalau tidak maka yang namanya Borobudur saling menyalahkan. Nanti mungkin Sangiran akan saling menyalahkan dan ini aset pusat begitu kan, ini aset pusat.

Kemudian berikutnya masalah retribusi atau apa begitu, padahal kewenangannya ini. Ini makanya yang perlu Bapak-Ibu mungkin memberi masukan. Jadi bagaimana, misalnya ini ditarik ke Undang-Undang Pariwisata sebagian itu tadi di beberapa pasal itu dimasukkan ke, karena itu sudah ada tapi tidak dilaksanakan, perlu menguatkan.

Ini saya dengar karena dari apa namanya salah satu Kepala Dinas pemerintah provinsi, Dinas Pariwisata itu mengeluhkan begitu dan memberi masukan. "Pak ini sebetulnya sudah ada, tapi kadang *nggak* ada cantolan dengan yang lain terutama dengan Undang-Undang Pemda", sudah akhirnya tidak dilaksanakan. Malah sekarang ada mau bikin *single authority management* misalnya begitu. Itu kan inovasi-inovasi baru yang Undang-Undangnya sebetulnya sudah ada, ini karena *nggak* ada *link* itu.



Nah itu saya kira masukan yang perlu dari Bapak-Ibu, apalagi mungkin *nggak* tau saya tidak tau apakah sudah disurvei atau tidak di pemerintah kabupaten/kota, di situ ada destinasi wisata yang banyak orang kaya datang ke situ, banyak orang mengeluarkan uang di situ, tetapi masyarakat di sekitar itu tidak merasakan.

Misalnya, sudah di, sudah diberikan ke investor misalnya begitu, sehingga masyarakat itu hanya tukang parkir atau jual asongan itu aja sudah. Bisa ditanya ini lagi-lagi contohnya-contohnya daerahnya Bu Ketua ini jadinya. Di Magelang tadi misalnya Borobudur, itu kata Bupati daerah yang paling miskin di sekitar Borobudur itu. *Nah* ini kan, ini kan menyedihkan, di situ orang di situ mau lezat, mau santai mengeluarkan uang banyak masyarakat situ *nggak* mendapatkan manfaat.

Di situ malah ribut Ada PT TWC yang dibawa BUMN, kemudian Badan Otorita Borobudur, kemudian ada apa lagi TWC itu, TWC itu Taman Wisata Candi Borobudur istilahnya begitu. Jadi masyarakat apalagi ini sekarang kan lagi anu apa namanya *booming* ini apa desa wisata, kemudian pokdarwis segala macam. Kalau pokdarwisnya bagus, ya kita nanti pentahelix, pentahelix itu kan ada salah satunya adalah bisnis. Jadi bisa di apa diundang investor.

Kalau investor udah datang, kalau kemudian menggerus pokdarwis itu berbahaya. *Nah* maka kemudian saya kira dibutuhkan masukan dari Bapak-Ibu ini yang di lapangan. Jadi ini jangan kemudian mengeluh setelah sudah jadi. Jadi sudah jadi nanti Bapak-Ibu punya apa namanya otoritas dan punya peluang untuk bisa memberikan masukan-masukan.

Termasuk juga ini Bu, Bapak, apa namanya pariwisata ini sekarang dikawinkan. Kalau secara institusi di tingkat pusat itu pariwisata dan ekonomi kreatif, karena latar belakangnya kan sesungguhnya devisa negara dari ekonomi kreatif lebih tinggi dari pariwisata. Pariwisata itu devisanya sebelum pandemi 21 miliar US Dollar, kemudian ekonomi kreatif yang 17 sub sektor itu 23 miliar US Dollar, kalau digabung itu jadi 44 miliar US Dollar. Itu mengalahkan minyak, gas dan seterusnya-seterusnya kita punya *nggak* ada keluhan misalnya saya *nggak* punya sumber daya alam apa segala macam itu punya, tapi sayangnya itu ekonomi kreatif juga masih dilihat di sebelah mata dan tidak di apa namanya tidak dikawinkan.

Kalau mau dikawinkan maka kemudian akan menjadi *background* katanya, apa namanya tulang punggung ekonomi Indonesia, ini kata Pak Presiden sebelum-sebelum pandemi, sebelum pandemi.

Nah kemudian saya terakhir ini, maraknya ini Bapak-Ibu barangkali karena kabupaten/kota produk dokumennya dalam perjalanan tadi RIPAR ya, Rencana Induk Pariwisata. Kemudian barangkali yang-yang mungkin selevel dan sama-sama mengatur tadi mungkin RUTR atau RT/RW. *Nah* itu kan bentuknya Perda ya sama-sama Perda ya, Pak. *Nah* sama-sama Perda kan sama-sama kuat, kalau *nggak* nyambung bahaya ini, Pak.

Terus Bapak-Ibu, itu satu dengan yang lain nggak sendiri-sendiri nih, misalnya Samarinda sendiri. Pariwisata nggak bisa, pariwisata di situ mesti dia harus ada kaitan dengan kabupaten/kota sekitarnya. *Nah* karena di kabupaten/kota sekitarnya secara ini kan pariwisata kayanya pariwisata berkelanjutan, dokumennya itu ada di provinsi, dokumen perda RT/RW. RT/RW itu harus melekat-melekat nempel di dalamnya ada kajian lingkungan hidup strategis.

Nah itu yang makanya kalau ada potensi-potensi yang bagus, ada desa wisata yang bagus sertakan ini dimasukkan di dalam KLHS itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ini tadi kabupaten/kota tok ya belum ada provinsinya. Oh belum, kalau ada ya minta tolong ini berarti kabupaten/kota minta disertakan. Jadi supaya apa Kota Samarinda kemudian dengan kota-kota atau kabupaten yang lain diikutkan dalam kajian lingkungan hidup strategis yang itu dokumennya ada di provinsi di Perda apa, rencana tata ruang dan wilayah itu.

Terima kasih, Bu Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Yang Ibu Hetifah dan Pak Fikri membantu kita melakukan *review* yang belum disampaikan dari sekian banyak *review* yang sudah disampaikan, tadi adalah bahwa kita berharap pariwisata ini menjadi sektor prioritas oleh negara. Karena dengan pariwisata tentu kita memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan persyaratan banyak sekali tadi permintaannya ada akses aksesibilitas, konektivitas. Kemudian peluang-peluang yang diciptakan oleh antar lembaga, antar pelaku pariwisata dan lembaga, antar pelaku pariwisata dan masyarakat, serta antar pemerintah dengan masyarakat untuk bisa mengundang wisatawan asing maupun wisatawan domestik.

Kemudian adanya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan. Bapak-Ibu dari Komisi X, tadi menyampaikan banyak sekali pertanyaan. Baik yang menyangkut kondisi wilayah kabupaten/kota masing-masing yang hadir di sini sampai dengan berbagai macam peraturan. Ada juga yang menanyakan mengenai berapa besar alokasi APBD untuk mendukung perkembangan pariwisata di kabupaten/kota Bapak-Ibu masing-masing.

Baik karena waktu kita berikan kesempatan kepada masing-masing untuk memberikan jawaban atau mau diwakilkan atau mau memberikan jawaban masing-masing diberi waktu 3 menit Bapak-Ibu.

Bapak-Bapak semua ini. *Monggo*, iya ada sih yang tidak mendapatkan pertanyaan tapi ada yang mendapatkan pertanyaan banyak sekali.



Mungkin kita mulai dari yang mendapatkan pertanyaan sangat banyak dari pemerintah Kota Samarinda, silakan diberikan tanggapan dari Ibu Illiza dan Bu Hetifah serta beberapa teman yang lain, silakan Pak. Waktunya maksimal 3 menit ya Pak, mohon maaf Pak.

WAKIL WALIKOTA SAMARINDA (Ir. H. RUSMADI, M.S., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Pertama untuk Bu Illiza, mungkin ke Samarinda saja Bu, Samarinda sekarang berbeda sudah dengan pada saat pertama Ibu ke sana. Karena sudah ada jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda 1 jam, jadi Ibu *nggak* perlu muter dan sampai mabuk di jalan. Kami undang secara khusus, salam hormat untuk Pak Tarmiji, Bu.

Beberapa tadi yang terkait dengan ini apa wisata berbasis sungai, terutama Pak Andreas dan Pak Nur Purnamasidi tadi. Saya kira bagi pemerintah Kota Samarinda ini, menjadikan wisata sungai ini tidak saja dalam rangka sebagai wisata untuk menikmati keindahan tetapi wisata sungai ini menempatkan sungai ini sebagai bagian daripada sebuah ekosistem, sebagai daerah aliran sungai. Sehingga ketika bicara wisata sungai tentu perhatian kita bukan saja aspek ekonomi, tetapi aspek pelestarian lingkungan juga perlu untuk mendapatkan perhatian.

Hanya memang terkait dengan Sungai Mahakam karena memang panjang 920 kilometer ini ada tiga-tiga kabupaten/kota yaitu Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dengan Samarinda, dan bahkan di hulunya itu ada sebagian masuk Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pak-Pak Nur tadi penting untuk melakukan kerjasama.

Kami bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah apa, sudah menetapkan Perda terkait dengan Rencana Induk Pariwisata Provinsi dan salah satunya menetapkan kawasan strategis pariwisata provinsi yang apa, yang mengatur kerjasama yaitu Samarinda, Tenggarong dan Tanjung Isue. Jadi kalau Bapak dengar Tanjung Isue, ini kawasan apa yang di mana memiliki 3 danau di sekitar sana, yaitu Danau Jempang, Danau Maninjau dan Danau Semayang.

Bagi Samarinda ini adalah merupakan apa tangkapan air sehingga pemerintah kota sendiri memberikan perhatian susur sungai ini bukan sekedar susur sungai, tetapi juga mudah-mudahan pemerintah pusat kita semua memberikan perhatian terhadap tiga danau ini yang merupakan tangkapan air. Sehingga kalau bicara susur Sungai Mahakam ini tidak saja dalam rangka untuk penerimaan daerah tetapi juga dalam rangka pelestarian lingkungan dan kalau Bapak-Bapak Komisi X, pemerintah pusat memberikan perhatian ini termasuk juga menyelesaikan persoalan banjir Samarinda Pak, banjir Samarinda.

Sekali lagi kami terima kasih Pak Nur tentang pentingnya kerjasama antar-antar daerah ini dan pemerintah kota sendiri memang jujur belum menyusun ini. Belum memiliki rencana induk pariwisata daerah sehingga kesempatan pertama 2018 ya. Oke jadi sudah memiliki rancangan rencana induk peraturan daerah sudah lama, tetapi mungkin perlu untuk dilakukan *review* sekali, *review* lagi dalam rangka untuk penyesuaian terhadap perkembangan yang ada.

Dan saya kira itu terkait apa beberapa tadi yang-yang mengarah kepada kota Samarinda. Kemudian Bu Ledia, PKS ini memang bantaran sungai ini terkait dengan kewenangan terutama Bu. Kalau Sungai Mahakam itu daerah aliran sungai Mahakam dan Berau, jadi dari sisi kewenangan sebenarnya ini kewenangan pemerintah pusat dan kita khawatirkan, *alhamdulillah* bersyukur tidak ada benturan selama ini. Karena di Perda provinsi itu sama terkait dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota sudah mengatur terkait dengan bantaran sungai berapa lebar dari pinggir sungai yang sempadan yang bisa dibangun.

KETUA RAPAT:

Bisa dipercepat, Pak? Bisa dipercepat?

WAKIL WALIKOTA SAMARINDA (Ir. H. RUSMADI, M.S., Ph.D.):

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf ya karena waktunya. Mungkin ada hal-hal yang nantinya tadinya ditanyakan belum sempat dijawab Pak, kami mohon untuk bisa diberikan penjelasan lebih abstraktif secara tertulis dan dikirimkan kepada Sekretariat Komisi X.

Selanjutnya kami berikan kesempatan pertanyaan tadi ada kepada kalau tidak salah mana tadi ya atau menjawab satu-satu saja silakan. Ya cagar budaya Kabupaten Mojokerto ya, Mojokerto silakan Mojokerto, kemudian Kabupaten Sragen.

MOJOKERTO:

Terima kasih, Pimpinan.

Terkait dengan cagar budaya di Mojokerto, memang jumlahnya sangat banyak dan saat ini dikelola oleh BPKW. BPKW itu Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 atau dulu disebut sebagai PPJB, di mana PPJB memiliki kewenangan untuk melakukan pelestarian. Namun beberapa diantaranya salah satunya adalah Petirtaan Jolotundo, itu adalah peninggalan dari masa era sebelum Majapahit, itu kami kelola secara bersama-sama.



Jadi pengelolaan cagar budaya di Mojokerto itu sudah sangat tertata sekali Bu, yang secara teknis dikelola oleh PP, PPJB dulu istilahnya sekarang BPKW dari wilayah 11 bekerjasama dengan kami. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eskavas secara temuan-temuan yang baru ada kerjasama, bahkan kami menganggarkan di tahun kemarin dua kali ekskavasi dalam rangka membantu rekan-rekan PPJB atau BPKW 11 untuk melakukan ekskavasi.

Hanya memang yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kami berniat melakukan pembangunan Taman Majapahit, itu di tahun 2017 sudah di perintis kemudian masuk dalam Perpres 80/2019, investasi sudah masuk terkait dengan pengurukan *ground check* DED FS dan sebagainya. Ternyata lokasi yang kami tempati itu adalah lokasi penyangga 2 situs milik PPJB, situs Kolam Segaran. Kolam Segaran itu peninggalan Majapahit yang sangat luas sekali yang diperkirakan sebagai sistem pengairan di era Majapahit dan masih utuh dan Balong bunder ada di tengah-tengah. Itu menjadi hal yang pelik kemarin, namun komunikasi kami dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah berkali-kali ke masyarakat dan itu tadi saya sampaikan bahwa ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kami di pemerintah daerah harus membuat *heritage impact assessment* atau Amdal dalam konteks ke apa cagar budaya. Itu yang nanti dipakai dalil untuk diizinkan atau tidak diizinkan pembangunan Taman Majapahit yang ada di wilayah Trowulan.

Jadi terkait dengan cagar budaya sekali lagi di Kabupaten Mojokerto sudah sangat tertata dengan baik karena adanya BPKW, badan, balai pengelola kebudayaan wilayah 11 atau dulu disebut PPJB yang pusatnya dari Trowulan dan kemudian membawai, menaungi area Kabupaten Mojokerto bahkan sampai di Kabupaten Jombang, Pasuruan dan sebagainya. Karena sangat banyak sekali situs yang ada sekitar 500 situs peninggalan Majapahit maupun pra Majapahit.

Kemudian ini yang tadi pertanyaan umum apakah, dari beliau ini apakah kita melibatkan *influencer*. Sudah Ibu, kami di Kabupaten Mojokerto ada 20 *influencer* yang kami-kami apa kami pilih, karena sudah banyak pengikutnya itu untuk ikut selalu mempromosikan baik *event* maupun tempat wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Jadi adanya *influencer* ini kayaknya memang lebih cepat untuk menyampaikan informasi daripada mohon maaf media-media masa yang apa yang apa yang lama gitu.

Kemudian terkait dengan pertanyaan yang sifatnya umum tadi, apakah di tempat wisata kami sudah ada sarana yang ramah dengan disabilitas? Hampir 70% di Kabupaten Mojokerto sudah ada setidaknya sarana mempermudah bagi wisatawan yang mohon maaf disabilitas.

Kegiatan ini sering diinisiasi oleh Forum Kabupaten Sehat yang ada di Kabupaten Mojokerto, yang mana mereka selalu mengagendakan kegiatan dengan bersama kami dan salah satu poinnya adalah untuk kami di bidang



pariwisata ini menyediakan sarana untuk mempermudah wisatawan disabilitas bisa memasuki di area wisata kami.

Demikian Ibu, mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Silakan Kabupaten Sragen.

WAKIL BUPATI SRAGEN (SUROTO):

Terima kasih atas waktunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Untuk Kabupaten Sragen cagar budaya kita sudah terlaksana dan dikelola dengan baik Bu Pimpinan. Jadi dikelola dengan metode pengelolaan bersama yaitu dari pusat, provinsi dan Kabupaten Sragen. Jadi sudah tertata dengan rapi dan juga jalan dengan *running-nya well* itu, jadi tidak ada permasalahan untuk agar budaya di Sangiran kepada Sragen.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Promosi Sragen ya, sekarang ini mempunyai 32 titik destinasi wisata, keren ya keren banget. Jangan nanti ada yang pindah dapil ke sana.

Selanjutnya Palembang silakan.

WALIKOTA PALEMBANG (SULAIMAN AMIN):

Makasih, Bu Pimpinan.

Jadi kami menanggapi dari Pak Nur tadi menyangkut masalah pengembangan wisata berbasis sungai. Jadi untuk masalah Sungai Musi sebetulnya Sungai Musi ini dilewati oleh beberapa kabupaten, Palembang, Musi Banyu Asin, Muara Enim, juga termasuk OKI dan sungai ini dari sisi kewenangan adalah kewenangan dari sungai nasional. *Nah* jadi ini turunnya langsung ke Balai Besar sungai yang berkoordinasi dengan provinsi Sumatera Selatan.



Nah, di dalam kaitan kerjasama ini memang sudah diinisiasi oleh provinsi, kita melakukan kerjasama pembangunan untuk daerah-daerah sekitar Palembang. *Nah* dalam penanganan sampah ini Tentunya ini dikoordinir oleh Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang kendalanya di saat Palembang bersih, begitu hujan lebat atau aliran air naik itu sampahnya kembali ke Palembang. Jadi di bawah jembatan ampera itu sering banyak sekali sampah-sampah eceng gondok itu.

Nah inilah penanganan ini, kita sudah berkoordinasi dengan balai besar sungai yang ada di Kota Palembang untuk melakukan pembersihan ini, itu yang pertama.

Yang kedua, kawasan wisata seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi itu Benteng Koto Besak. Benteng Kuto Besak ini sebetulnya di mana-mana benteng itu biasanya menjadi aset pemerintah, tetapi di Palembang Benteng Koto Besak asetnya diambil alih oleh TNI. *Nah* padahal benteng itu adalah satu-satunya benteng yang dibangun oleh kesultanan.

Jadi kalau yang di tempat lain banyak dibangun oleh Inggris, oleh Belanda, ini khusus dibangun Kesultanan Palembang, tetapi dikuasai oleh TNI. Jadi kita tidak bisa masuk ke situ. Jadi begitu ada permasalahan parkir, tempat-tempat yang dikuasai oleh TNI, begitu pemerintah kita akan melakukan penataan penertiban kita berbenturan dengan TNI ini. Kemarin bahkan sampai memakan korban.

Jadi ada masyarakat, ada pegawai kita juga berbenturan dengan oknum TNI yang ikut mendulang rezeki di sekitar Benteng Koto Besak itu. Mungkin ini juga kami mohon *support*-nya juga. Karena keinginan ada pemerintah Kota Palembang ya benteng ini sebetulnya menjadi destinasi wisata, wisata, sejarah dan budaya. Tetapi sekarang jangankan wisatawan kita pemerintahan saja tidak bisa masuk ke dalam benteng itu, karena menjadi pusat kegiatan dari TNI yang ada di Kota Palembang.

Mungkin itu sementara dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Jadi ini salah satu kewenangan yang jelas yang ada di mana gitu ya, karena sebenarnya milik Pemkot yang bisa dipakai untuk peningkatan, eh penambahan apa namanya, destinasi yang dimiliki tetapi ternyata sekarang berada dalam penguasaan TNI. Harusnya menurut Undang-Undang yang menjadi penguasaan TNI adalah benteng-benteng milik Belanda dulu ya, iya sih kayaknya.



Nanti mungkin ada di sini ada Pak Mustafa Kamal, bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pak Mustafa Kamal. Kita komisi membantu ya Bu, nanti kita sampaikan bersama-sama supaya ini menjadi solusi yang melegakan semua pihak.

Baik kemudian selanjutnya dari Tanah Datar silakan, Pak.

BUPATI TANAH DATAR, BATUSANGKAR (EKA PUTRA, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dari Tanah Datar Bu, Bapak, dari Komisi X dapat kami sampaikan bahwa, kita sudah punya diparkap ini baru Pak, di Perdakan tahun 2023. Perda Nomor 2. Ini kenapa terlambat? Karena kita menyesuaikan dengan RT/RW, RT/RW-nya dan duluan kita yang membuat daripada KLHS yang dari provinsi yang sedang dibahas. Jadi kita tetap menyesuaikan dan kita sudah laporkan ke provinsi.

Kemudian yang kedua kita Ibu, wisata halal yang yang Perda Provinsi, ini memang untuk kabupaten/kota kita sudah melaksanakan. Kita di tempat objek wisata kalau ada kunjung atau turis yang datang ke tempat objek wisata misalnya di Istan Basa Pagaruyung, itu kan budaya, kebudayaan raja-raja Pagaruyung dulunya. Itu menurut adatnya bagi yang pakaian yang pakai celana pendek itu tidak boleh masuk, tapi kita berikan sarung untuk masuk ke atas Istan Basa Pagaruyung. Termasuk yang perempuan kalau yang yang apa yang bajunya kurang muslimah, ada kelihatan kita berikan selendang untuk menutupinya.

Kemudian tempat-tempat toilet dan musholanya kita pisahkan, tempat wudhunya kita pisahkan antara perempuan dan laki-laki. Jadi semuanya kita pakai adat yang adat orang Minangnya seperti itu dulu. Jadi itulah makanya ada namanya sumpah "Sakti Bukik Merapalam" peninggalan sejarah. Yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, itu tempatnya ada di Tanah Datar. Itu peninggalan budaya adat Minangkabau.

Kemudian ini yang cagar budaya yang paling banyak di Tanah Datar, Pak. Kelihatannya kami dengan Dirjen Kebudayaan belum sinkron. Kenapa, kami ada benteng, ada rumah kerajaan, peninggalan sejarah ada. Karena pariwisata yang mengelola, akhirnya tidak satupun diperhatikan ini, karena pemeliharaan itu masih dibebankan kepada pemerintah daerah. Ini yang mohon bantuan nanti bagaimana dengan Dirjen Kebudayaan, karena akan membebani juga anggaran yang terbatas dari daerah juga akan membebani juga nanti dari peninggalan sejarah yang kita pelihara dengan baik.

Itu yang sementara yang dari Tanah Datar, mohon maaf kami sudahi.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya dari Pak Sekda Kepulauan Mentawai, nanti terakhir dari Kepala Dinas Kabupaten Maros.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
(RINDALDI, S.Kom., M.M.):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tadi ada saran dari Pak Rano Karno, terkait dengan *surfing* yang memang menjadi andalan kita Pak, Bu. Jadi Bapak-Ibu, kami di Mentawai itu memiliki dua andalan yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang pertama adalah spot *surfing* cukup banyak dan telah diakui oleh dunia 2 spot yang sudah berkelas dunia. Kalau kita mau bicaranya nomor 2 dari Hawaii, Hawaii nomor 1.

Jadi memang secara struktur tadi Pak Rano Karno sampaikan. Sebenarnya kami di Mentawai Bu, Bapak-Ibu sudah menyiapkan tanah untuk pembangunan dermaga di sekitaran lokasi *surfing* itu. Jadi tinggal bagaimana nanti pemerintah melalui pemerintah pusat. Karena memang untuk membangun dermaga itu selalu dari Kementerian kurang lebih itu, jadi kalau tanahnya udah kami siapkan.

Yang kedua yang andalan itu adalah kota tertua di dunia ada juga di Mentawai. Jadi dua itu merupakan wisata bahari dan wisata budaya yang saat ini memang menjadi andalan kita di sana. Itu saja yang bisa kami sampaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Kita *nggak* ada yang dari Sumbar ya Anggota DPR-nya, oh iya-ya baru-baru-baru. Mudah-mudahan Pak nanti ada yang mengingatkan, kalau tidak ada yang dari yang mengawal itu kadang-kadang ya kita berpikir untuk dapilnya sendiri. Jadi ada Ibu Illiza yang baru ya.

Monggo selanjutnya terakhir Pak dari Maros.

MAROS:

Terima kasih, Ibu Pimpinan.



Pengelolaan sungai di kawasan wisata sungai Ramang-Ramang dengan jarak 4 kilometer dilakukan oleh Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang. Jadi kami bekerja sama dengan Balai Besar Pompengan dengan melibatkan pemerintah daerah juga ada Dinas PUPR mengenai penataan ruang. Jadi ada sampadan sungai, teman-teman pemerintah desa yang mengawasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, jangan ada yang keluar daripada sampadan sungai yang telah ditetapkan.

Terus promosi pariwisata apakah melibatkan *influencer*. Jadi kami di Kabupaten Maros mempunyai bonus demografi 52% kaum muda itu yang menjadi potensi kami yang kami kembangkan dengan melibatkan adik-adik pemuda milenial dan melalui komunitas-komunitas. Ada komunitas GMP, Generasi Pesona Indonesia, Forum Komunitas Duta Daeng atau Duta wisata, IUT Forum Geopark Muara Tangkep itu yang kami pergunakan, kami edukasi mereka menjadi *influencer* muda.

Kami ingin menciptakan yang baru. Kami tidak ingin, kami pemuda-pemuda di Maros mereka jadi penonton kita memilih *influencer* dari luar, tapi kami bentuk mereka kami laksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan, bagaimana menggunakan sosmed digitalisasi supaya mereka mempunyai jiwa rasa cinta terhadap destinasi wisata yang mereka miliki.

Terus sarana disabilitas, *alhamdulillah* di Bantimurung itu adalah andalan kami yang sampai 9 miliar mendapatkan PAD sudah ramah disabilitas. Khusus untuk Ramang-Ramang Bu, mungkin karena kontur yang agak susah di sana karena kita harus melewati pematang-pematang sawah, kita harus masuk goa. Mungkin itu yang kendala untuk kamu disabilitas teman-teman kita, tapi kita akan harus mengarah ke sana, karena bicara pariwisata semua mempunyai hak untuk bisa menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia.

Terus untuk cagar budaya kami mengelola beberapa destinasi cagar budaya, yang terkenal itu liang-liang telapak tangan purbakala yang disampaikan tadi oleh Amure bahwa, itu adalah peninggalan prasejarah dan kami kelola bersama-sama. Selama ini mungkin kalau di Mojokerto cukup dengan BPCP, kami bertiga mengelola karena ada BPJB dan taman nasional yang mempunyai lahan di lokasi tersebut, dan untuk pengelolaan pendapatan asli daerah diserahkan kepada pemerintah daerah kami sistem bagi hasil. Jadi memungut retribusi itu adalah kami, nanti kami bagi hasil dengan taman nasional dan balai cagar budaya.

Terus wisata halal, *alhamdulillah* kami sudah laksanakan tahun ini walaupun dalam konteks yang lebih kecil dulu karena ini hal yang baru. Kami tidak ingin ada polemik juga di masyarakat karena ini menyangkut yang agak yang baru di Maros. Tetapi kami sudah mempunyai kawasan di daerah Grand Mall kawasan khusus untuk penerapan wisata halal yang ada di Kabupaten Maros dan pada kesempatan ini juga kami mengajak kepada Ibu Pimpinan rapat dan Anggota Komisi X DPR RI untuk bisa ke Maros, kami punya *tagline* "Ayo ke Maros, ke Maros Saja Semua Ada".

Terima kasih.



*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Ayo kita ke Maros ayo.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang terakhir kita akan membacakan resume yang tadi sudah di-*highlight* oleh Bu Hetifah dan Pak Fikri bisa ditampilkan.

Yang pertama, seluruh masukan, informasi, pertanyaan dan berbagai hal yang disampaikan di ruangan ini, selama kurun waktu berapa jam ini tadi kita ya? Hampir 5 jam ya dari jam 11 sampai jam 3, merupakan hal yang akan menjadi masukan, tidak terlepas dari kesimpulan kita terhadap masukan dari para narasumber Panja RUU Kepariwisataan menyampaikan pandangan dan tanggapan.

1. Panja RUU akan melakukan kajian terhadap substansi yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang terkait lainnya.
2. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI akan melakukan kajian terhadap perlunya penguatan infrastruktur pariwisata untuk akses dan konektivitas destinasi pariwisata di daerah dan antar daerah, termasuk di dalamnya adalah pendanaan pariwisata secara umum.
3. Panja RUU Pariwisata akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan pola kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah, pemerintah daerah, dalam tata kelola destinasi pariwisata dan kebijakan otonomi daerah.
4. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X mendukung penguatan pengaturan pengelolaan cagar budaya yang terintegrasi dengan destinasi pariwisata di daerah.
5. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X mendukung penguatan pengelolaan wisata bahari, wisata di daerah aliran sungai sebagai bagian semangat memperkuat pariwisata berkelanjutan.
6. RUU Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dan menjadikan pariwisata sebagai investasi sehingga pengaturannya dapat diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa.



Demikian Bapak Ibu bahan masukan dan keseluruhannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Rapat ditutup pukul 15.04 menit apakah disetujui?

Setuju terima kasih.

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara Rapat Dengar Pendapat dengan 8, 8 ya, 8 kabupaten/kota.

Terima kasih atas keikutsertaan pariwisata dan terima kasih pula kepada para Anggota Komisi X yang masih semangat sampai hari ini untuk menciptakan Revisi Undang-Undang Kepariwisata, sehingga menjadi bagian upaya dari DPR ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui perkembangan pariwisata.

Rapat saya tutup.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT:SELESAI)

(KETUK PALU 3 KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.05 WIB)

a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

TTD

DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003

